



**RENSTRA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
2021-2026**

**PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS KESEHATAN

Jalan. Jendral Sudirman Telp. 0742 – 21144 Kuala Tungkal

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 050/212/DINKES/2022**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan Capaian dan sarana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2006 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, sebagaimana dimaksud dictum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kuala Tungkal

Pada tanggal : Juni 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SAHARUDIN

KATA PENGANTAR

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah.

Rencana Strategis tahun 2021-2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersisi tentang rencana program dan kegiatan, prediksi pelaksanaan program, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Reviu terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur Dinas termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan program.

Kami mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021-2026. Semoga dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, dapat bermanfaat untuk program pembangunan di bidang kesehatan.

Kuala Tungkal, Juni 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ZAHARUDIN, SKM

Pembina/IV a

NIP. 196704 07199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II.GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD	8
A. Tugas dan Fungsi Sekertaris (Sekretariat) Dinas Kesehatan Kabupten Tanjung Jabung Barat	11
B. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	14
C. Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ...	18
D. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	23
E. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	28
F. Struktur Organisasi	32
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	34
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	50
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	52
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	52
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	63
3.2.1 Visi Kepala Daerah	63
3.2.2 Misi Kepala Daerah	65
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupate/Kota	74
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	84
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	84

3.4.2 Analisis kajian Lingkungan hidup strategis (KLHS)	92
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	97
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	104
4.1 Tujuan	104
4.2 Sasaran	104
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	106
5.1 Strategi	106
5.2 Arah Kebijakan	106
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	108
BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	130
BAB VIII.PENUTUP	146

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2	Misi Berdasarkan Permasalahan Dan Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Bidang Kesehatan	66
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Serta Faktor Penghambat Dan Pendorong	75
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra Dinkes provinsi serta faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	82
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang(Rtrw) Wilayah Serta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	85
Tabel 3.6	Telaah Rencana Struktur Tata Ruangan Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung jabung Barat.....	86
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan	93
Tabel 3.8	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Tanjung jabung barat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	94
Tabel 3.9	SKOR Penentuan BOBOT Dari Kriteria ISU-ISU Strategis	101
Tabel 3.10	Skor Kriteria Penentuan Isi_Isu Strategis	102
Tabel 3.11	Nilai Skala Kriteria	103

Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	42
Tabel T-C.24	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	44
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	105
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	107
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	109
Tabel T-C. 28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu dokumen Perencanaan strategis yang disusun secara rinci oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 Tahun, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam rencana kerja setiap tahun yang terintegritas melalui program dan kegiatan guna pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan prinsip kebutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan sektor Kesehatan dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan sektor Kesehatan sebelumnya. Kesenambungan penetapan sasaran pembangunan Kesehatan penjabaran dari program prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

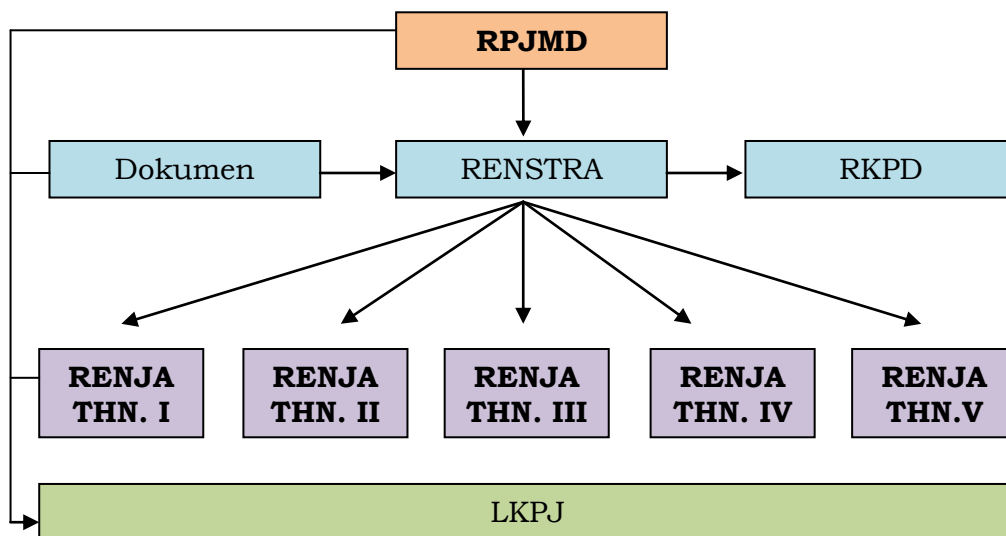
Rencana Strategis (*Renstra*) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (***strengths***), kelemahan (***weakness***), peluang (***opportunities***) dan ancaman (***threats***) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Renstra Satuan Kerja merupakan Dokumen Perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, APBN dan Sumber Biaya lainnya dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan turunan/ penjabaran lebih lanjut dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan merupakan Acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Dalam proses penyusunan renstra perlu dukungan yang optimal untuk implementasi dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Bagan alur Renstra



1.2 Landasan Hukum

Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis dalam memecahkan permasalahan di bidang kesehatan secara bertahap.

Landasan Hukum penyusunan Renstra Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
- 5) Undang-Undang nomor 44 tahun 2009, Tentang rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
- 8) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 14) Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RPJPD dan Renja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat.
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2025;
- 26) Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 27) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 28) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
- 29) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 ini disusun sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Unit Pelaksana Teknis, Sektor terkait dan masyarakat umum dalam pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus merupakan pedoman dalam penentuan pilihan program/kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

b. Tujuan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi sektor Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang Kesehatan 2021- 2026;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021–2026 disusun dengan *Sistematika Penulisan* sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaah Renstra K/L.
- 3.4. Telaah RTRW Tanjung Jabung Barat dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada pasal 232 ayat (1) undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2287) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Kesehatan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Kesehatan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (satu) orang Sekretaris

3. 4 (empat) orang Kepala Bidang
4. 15 (lima belas) orang Kepala Seksi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, mutu dan tradisional
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Seksi Pelayanan jaminan Kesehatan
- d. Bidang Sumber daya Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Kefarmasian.
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 3. Seksi Alat kesehatan.
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Surveilans dan imunisasi.
 2. Seksi pencegahan dan pengendalian Penyakit menular
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian penyakit Tidak menular dan keswa.
- f. Bidang Kesehatan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi masyarakat.
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan masyarakat.
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah raga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 1. RSUD KH Daud Arif
 2. RSUD Suryah Khairuddin
 3. Puskesmas
 4. Instalasi Farmasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Tipologi A dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan jabatan Eselon II B atau dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam menjalankan roda organisasi Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1) Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas:

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang Kesehatan.

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Tugas dan Fungsi Sekertaris (Sekretariat) Dinas Kesehatan Kabupten Tanjung Jabung Barat

Tugas :Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.

Fungsi :

- a) Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Subbagian yaitu:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

Fungsi:

- a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d) Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e) Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan

Tugas :

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan

Fungsi :

- a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- c) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- d) Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

(3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program yang menjadi tanggung jawab tugas pokok dalam melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan Program .

Fungsi

- a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c) Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d) Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e) Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f) Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja

- (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

B. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat kepada seluruh unsur kesehatan keluarga, gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga di lingkungan Dinas Kesehatan.

Fungsi

- a) Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang kesehatan masyarakat;
- b) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu, kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- c) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- d) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;

- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rumpun bidang Kesehatan masyarakat sbb :

(1). **Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat :**

Tugas :

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan keluarga dan gizi.

Fungsi

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu ,kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;

- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, bayi, anak balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, lanjut usia, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan surveilans gizi serta pengelolaan konsumsi gizi;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan lintas program dan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(2). Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi

- sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi, kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(3). Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Fungsi

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;

- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
- f) Melakukan pemeriksaan, pengawasan dan memberi rekomendasi pangan dan tempat-tempat umum;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

C. Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit kepada seluruh unsur Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular serta Kesehatan Jiwa di lingkungan Dinas Kesehatan ;

Fungsi:

- a) Perumusan kebijakan dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vector, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- g) Rumpun bagian bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit sebagai berikut:

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi.

Fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, imunisasi;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular secara langsung atau penyakit tular vector dan zoonotik.

Fungsi

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan

arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;

- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberculosis, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), HIV AIDS dan Penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirusus, serta vector dan binatang pembawa penyakit;

- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular masalah kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).

Fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak

- dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
 - e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolic, dan gangguan indera dan fungsional, kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

D. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan kepada seluruh unsur pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu di lingkungan Dinas Kesehatan

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

Rumpun bagian bidang Pelayanan Kesehatan sbb ;

1) Seksi Pelayanan Kesehatan primer, Mutu dan Tradisional

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, mutu, akreditasi dan kesehatan tradisional.

Fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktek perorangan, fasilitas

- kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktek perorangan, fasilitas kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktek perorangan, fasilitas kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktek perorangan, fasilitas kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer

pada klinik dan praktek perorangan, fasilitas kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;

- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

g) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan Rujukan.

Fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medic dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pemerintah;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medic dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pemerintah;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pemerintah;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu,

- dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pemerintah;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pemerintah;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

1) Seksi Fasilitas Pelayanan Jaminan Kesehatan :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Jaminan kesehatan.

Fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaminan kesehatan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jaminan kesehatan;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaminan kesehatan;
- d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaminan kesehatan;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

E. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya kesehatan kepada seluruh unsur kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan.

Fungsi:

- a) Perumusan kebijakan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
- g) Rumpun bagian bidang Sumber Daya Kesehatan sbb:

1) Seksi Kefarmasian :

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penilaian ketersediaan, pengendalian harga, pengadaan obat publik serta perbekalan kesehatan;
- b) Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penilaian ketersediaan, pengendalian harga, pengadaan obat publik serta perbekalan kesehatan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan penggunaan obat rasional;
- d) Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan penggunaan obat rasional;
- e) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
- f) Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pelaksanaan sertifikasi/rekomendasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

2) Seksi Alat Kesehatan:

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan rumah tangga ;
- b) Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan rumah tangga ;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan rumah tangga ;
- d) Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan rumah tangga ;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

(3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan :

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi

- a) Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, penilaian angka kredit tenaga kesehatan, fasilitasi pelatihan, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan, serta penilaian tenaga kesehatan;
- b) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya kesehatan, penilaian angka kredit tenaga kesehatan, fasilitasi pelatihan, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan, serta penilaian tenaga kesehatan;
- c) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya kesehatan, analisa kebutuhan pegawai, penilaian angka kredit tenaga kesehatan, fasilitasi pelatihan, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan, serta penilaian tenaga kesehatan;
- d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan, penilaian angka kredit tenaga kesehatan, fasilitasi pelatihan, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan, serta penilaian tenaga kesehatan ;
- e) Penyiapan penyusunan dan pemutahiran data sumber daya manusia kesehatan;
- f) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian legalitas tenaga kesehatan;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

F. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan Dua Sub Bagian, dimana masing-masing bidang mempunyai 3 seksi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu perangkat yang ada dalam Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berperan aktif menjalankan tugas-tugas pemerintah dibidang Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No.46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintah kabupaten dibidang Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan dipimpin Oleh Kepala Dinas, yang bertanggung jawab Penuh kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekertaris Derah .

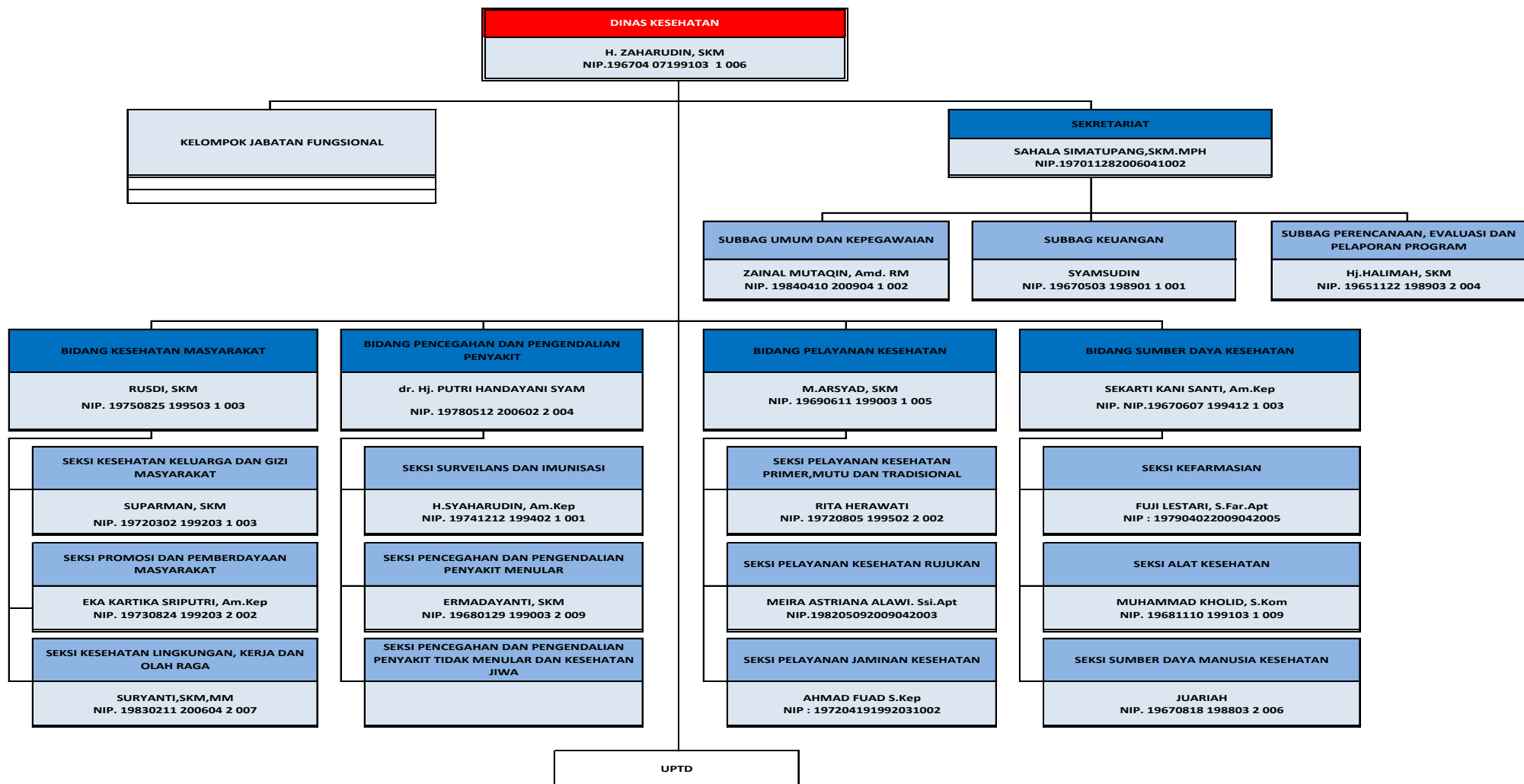
Secara Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjuing Jabung Barat telah memiliki unit pelaksana teknis dinas (UPTD) yaitu :

1. UPTD Khusus :
 - a. RSUD KH Daud Arif
 - b. RSUD Surya Khairudin
 - c. Instalasi Farmasi

2. Puskesmas

Puskesmas yang menyebar diseluruh kecamatan dengan Jumlah 16 unit, UPTD Puskesmas dipimpin seorang kepala dengan eselon IV.a dan seorang Kasubbag Tata Usaha dengan eselon IV.b

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dibawah jenjang Diploma III.

Undang-Undang tersebut membagi tenaga kesehatan menjadi beberapa rumpun dan sub rumpun yaitu tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

SDM Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari SDM Kesehatan yang bertugas di unit kesehatan (sarana pelayanan dan non pelayanan), dengan status Kepegawaian PNS, CPNS, PTT, dan Honorer (TKK). SDM Kesehatan tersebut bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten, RSUD KH Daud Arif dan Puskesmas. Data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) ini terdiri dari 13 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menggambarkan tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan.

1. Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan

a. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dengan demikian, untuk mendukung fungsi dan tujuan

Puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan.

Pada Permenkes tersebut diatur bahwa minimal tenaga kesehatan di Puskesmas terdiri dari dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik. Sedangkan tenaga penunjang kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya.

Puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki, terutama ketersediaan tenaga kesehatan.

Tabel 2.2.1 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Tanjung Jabung Barat

No	PUSKESMAS	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Kesmas	Kesling	Farmasi	Gizi	Labor
1	PELABUHAN	3	1	29	25	2	2	3	2	1
2	MERLUNG	4	1	23	35	4	3	3	2	2
3	SUBAN	3	1	22	40	5	2	4	2	1
4	PIJOAN BARU	2	1	15	26	1	1	3	1	2
5	PURWODADI	3	0	15	21	3	1	1	1	1
6	LUBUK KAMBING	2	0	15	26	3	1	2	2	1
7	BUKIT INDAH	1	0	8	17	1	0	1	2	1
8	RANTAU BADAQ	2	1	17	22	3	1	1	1	0
9	TELUK NILAU	2	0	24	41	1	1	2	2	2
10	SENYERANG	1	0	12	24	2	0	1	2	1
11	KUALA TUNGKAL I	3	1	26	29	2	2	3	1	3
12	KUALA TUNGKAL II	2	0	25	36	4	1	4	1	3
13	SUNGAI SAREN	2	1	16	28	3	1	2	2	2
14	TUNGKAL V	1	0	14	21	2	1	4	1	2
15	SUKOREJO	3	1	18	37	2	4	4	2	2
16	PARIT DELI	1	1	17	44	0	2	1	2	1
JUMLAH		35	9	296	472	38	23	39	26	25

b. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit). Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Sedangkan menurut pelayanan yang diberikan, rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

Tabel 2.2.2 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan di RSUD Suryah Khairrudin

Rumpun SDM	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Tenaga Kesehatan >> Keperawatan	24	11	35
Tenaga Kesehatan >> Kesehatan Masyarakat	1	3	4
Tenaga Kesehatan >> Keterampilan Fisik	0	2	2
Tenaga Kesehatan >> Medis	1	7	8
Tenaga Kesehatan >> Kebidanan	0	26	26
Tenaga Kesehatan >> Keteknisian Medis	3	1	4
Tenaga Kesehatan >> Kefarmasian	1	7	8
Tenaga Kesehatan >> Gizi	2	1	3
Tenaga Kesehatan >> Teknik Biomedika	0	5	5
Tenaga Penunjang >> Struktural	4	0	4
Tenaga Penunjang >> Dukungan Manajemen	29	19	48
Total	65	82	147

Pada saat ini RSUD Suryah Khairrudin sudah memiliki Layanan Dokter Spesialis anak dan Spesialis Penyakit Dalam dengan jadwal kunjungan setiap seminggu sekali dari Provinsi Jambi.

Tabel 2.2.2 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan di RSUD KH Daud Arif

No	JENIS SDM K	KONTRAK		KONTRAK		JUMLAH
		PNS	PPPK	BLUD	PGDS LAINNYA	
1	DIREKTUR	1		0		1
2	KEPALA BAGIAN	1		0		1
3	KEPALA BIDANG	2		0		2
4	KEPALA SEKSI	6		0		6
5	KEPALA SUB BAGIAN	3		0		3
6	DOKTER UMUM	7		6		13
7	DOKTER GIGI	3		0		3
8	DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI (Sp.An)	1		0		1
9	DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI (Sp.KG)	1		0		1
10	DOKTER SPESIALIS MATA (Sp.M)	2		0		2
11	DOKTER SPESIALIS OBSTETRI & GINEKOLOGI (Sp.OG)	2		0		2
12	DOKTER SPESIALIS ANAK (Sp.A)	1		0		1
13	DOKTER SPESIALIS BEDAH (Sp.B)	2				2
14	DOKTER SPESIALIS PARU-PULMONOLOGI (Sp.P)	0		1		1
15	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	0		2	1	3
16	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI (Sp.Rad)	1		0		1
17	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK (Sp.PK)				1	1
18	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri (Sp.KJ)				1	1
19	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi - Ahli Pertama				1	1
20	IT	0		3		3
21	S1 GIZI	2		2		4
22	APOTEKER/S.Farm	6		3		9
23	NERS	7		17		24
24	PENYULUH KESEHATAN (SKM)	3		1		4
25	D III KEPERAWATAN	35		69		104
26	D III KEBIDANAN	9		32		41
27	D III ANALIS	8		16		24
28	D III FARMASI	5		5		10
29	D III FISIOTHERAPY	4		0		4
30	D III REKAM MEDIS	2		1		3
31	Fisikawan Medik	1		0		1
32	D III RADIOLOGI	2		1		3
33	D III ELEKTROMEDIK	2		0		2
34	D III SANITARIAN	4		2		6
35	D III ASISTEN ANESTESI	1		2		3
36	DIII GIZI	2		2		4
37	D III KETEKNISIAN GIGI	4		2		6
38	ADMINISTRASI PERKANTORAN	25		44		69
39	SOPIR	0		9		9
40	IPSRS	0		6		6
41	SATPAM	0		17		17
42	PEKARYA LAUNDRY	0		6		6
43	LIMBAH	0		3		3
44	PERPAKIRAN	0		1		1
45	PEKARYA GIZI/ pengolah Makanan	0		8		8
	JUMLAH	155		261	1	420

2. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Tenaga Kesehatan dengan status PTT terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan bidan. Pada tahun 2020 telah diangkat menjadi PNS dan PTT daerah yang masih aktif bertugas di daerah dengan kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil yaitu bidan PTT Daerah sejumlah 30 orang.

Berdasarkan struktur organisasi perangkat daerah Dinas Kesehatan jumlah pegawai berdasarkan jabatan yang ada terdiri dari :

1. Eselon II B (Kepala Dinas) : 1 Orang
2. Eselon III A (Sekretaris) : 1 Orang
3. Eselon III B (Kepala Bidang) : 4 Orang
4. Eselon IV A (Kasubbag/Kasi) : 16 Orang

3. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu merupakan hal yang penting.

A. Sarana Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu merupakan hal yang penting,yaitu.:

a.Rumah Sakit Umum

Kabupaten Tanjung jabung barat mempunyai 2 Rumah sakit Rujukan yaitu Rumah sakit Umum daerah KH. Daud Arif yang terletak di kecamatan tungkal Ilir dan Rumah Sakit Umum Daerah Suryah Khairuddin yang terletak di kecamatan Merlung.

b.Puskesmas

Fasilitas pelayanan Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini, secara umum sudah memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tingkat pelayanan dasar, saat ini terdapat 16 puskesmas yang terletak pada 13 Kecamatan, yang terdiri dari 11 Puskesmas Non Rawat Inap dan 5 Puskesmas Rawat Inap.

c. Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu didirikan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan sampai ke daerah yang sulit dijangkau. Jumlah puskesmas pembantu yang beroperasi pada tahun 2021 adalah 71 unit.

d. Pos Kesehatan Desa

Jumlah Poskesdes pada tahun 2021 berjumlah 107 unit.

e. Puskesmas Keliling

Sarana transportasi pendukung pelayanan puskesmas antara lain puskesmas keliling (kendaraan roda 4) sebanyak 14 buah

f. Sarana Fasilitas Kesehatan lainnya

- Balai Pengobatan/ Klinik : 16 buah
- Apotik : 32 buah
- Toko Obat : 5 buah
- Posyandu : 297 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2021- 2026 yaitu “Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas ,Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Dalam mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021- 2026, antara lain :

1. Peningkatan sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021- 2026 yang terkait dengan tugas Dinas Kesehatan tertuang pada penjabaran Misi ke-1 yaitu Peningkatan sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak dan Misi Ke-3 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai penjabaran Visi, Misi dan IKU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan.
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mencapai IKU tersebut maka selama Tahun 2021-2026 Dinas Kesehatan mempunyai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama antara lain :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi umum Perangkat daerah
 - e. Pengadaan barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - f. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
 - h. Peningkatan BLUD
 - i. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat
 - a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah.
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah.
 - c. Penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara terintegrasi
 - d. Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Daerah.
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan.

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM
 - b. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan.
 - c. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
 - d. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Program Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan minuman.
- a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - b. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten.
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten.

Tabel T-C 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah .Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			v	4,4	6,6	5,5	12	5,3	12	5,8	12	5,2	12	2,73	0,88
2	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	SPM	IKK		100	100	100	100	100	85,98	89,22	89,97	93,57	84,4	0,86	0,89
3	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	SPM	IKK		100	100	100	100	100	76,25	45,84	59,51	75,93	72,8	0,76	0,46
4	Angka Kematian Balita Per 1000 kelahiran hidup			v	4,4	7	5,5	12	5,5	12	5,5	12	5,2	12	2,73	0,79
5	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup			v	4,3	6	5,3	12	4,3	12	5,8	12	5	12	2,79	0,97
6	cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	SPM	IKK		100	100	100	100	100	95,19	93,91	97,52	96,55	87,3	0,95	0,94
7	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup			v	45,9	90	78	312	109,5	312	66,6	312	78,7	312	6,80	0,74
8	cakupan pelayanan kesehatan balita (usia 12-59 bulan)	SPM	IKK		100	100	100	100	100	84,37	82,19	85,11	91,41	86,4	0,84	0,82
9	Rasio Posyandu Per 100.000 Balita			v	1	37	1	38	1	45	0,92	48	1	51,7	45,00	0,02
10	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standart	SPM	IKK		100	100	100	100	100	27,5	97,27	93,02	96,27	19,2	0,28	0,97
11	Rasio Rumah sakit per 100.000 penduduk			v	0,32	0,3	0,32	0,3	0,31	0,3	0,3	0,6	0,3	0,6	0,94	1,00
12	Rasio Dokter umum per 100.000 penduduk			v	21,7	22	25,6	23	20,77	23,5	25,73	26	20,06	27	1,08	1,17
13	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani			v	82,85	80	69,51	82	67,35	83	73,53	85	77,35	83	1,00	0,92
14	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			v	92,5	92	87,5	94	84,6	96	89,1	98	91,5	96	1,04	0,97
15	Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			v	93,3	80	92,5	85	85,8	90	95,5	95	96,3	95	0,96	1,19
16	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan			v	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00
17	cakupan pelayanan pada usia produktif(15-59 tahun)	SPM	IKK		100	100	100	100	100	75,71	83,89	99,94	52,15	38,1	0,76	0,84
18	Cakupan pelayanan pada usia lanjut (60 tahun ke atas)	SPM	IKK		100	100	100	100	100	40,61	44,76	67,73	46,66	36,4	0,41	0,45
19	Persentase Bayi 0-11 Bulan yang di Imunisasi Campak			v	95	95	95	95	95	95	103,25	95	102,21	95	1,00	1,09
20	cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar	SPM	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100,60	98,2	1,00	1,00
21	Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk			v	>2/100.000 anak<15th	>2/100.000 anak<15th	>2/100.000 anak<15th	>2/100.000 anak<15th	>2/100.000 anak<15th	1,09	2,17	7,56	5,39	4,31	0,55	1,09
22	Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis sesuai standar	SPM	IKK		100	100	100	100	100	17,24	22,23	33	46,51	52,1	0,17	0,22
24	Proporsi kasus Tuberculosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS			v	90	90	90	90	90	53,7	97,6	94,2	97,1	98,5	0,60	1,08
25	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita Insiden Rate DBD Per 100.000 penduduk			v	≤49/100.000 pddk(0.00049)	≤49/100.000 pddk(0.00049)	≤49/100.000 pddk(0.00049)	≤49/100.000 pddk(0.00049)	≤49/100.000 pddk(0.00049)	39/100.000 pddk(0.00049)	28/100.000 pddk(0.00028)	39/100.000 pddk(0.00039)	91/100.000 pddk(0.00091)	70/100.000 pddk(0.00070)	0,80	0,57
26	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus(DM)	SPM	IKK		100	100	100	100	100	20,96	22,21	67,78	100	74,7	0,21	0,22
28	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency = HIV) sesuai standar	SPM	IKK		100	100	100	100	100	80,75	82,89	90,63	56	70,2	0,81	0,83
29	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita penderita Hypertensi sesuai standar	SPM	IKK		100	100	100	100	100	41,2	46,46	50,58	51	40,7	0,41	0,46

Tujuan Pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan Derajat kesehatan dan Status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan financial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sampai dengan Tahun 2020 telah di keluarkan Peraturan-Peraturan dan instruksi Bupati sebanyak 10 (sepuluh) peraturan dan instruksi dengan usulan dari Dinas Kesehatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Pelayanan kesehatan di masyarakat.

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel beriku

Tabel T-C-2.4

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

URAIAN	anggaran pada tahun ke					Realisasi antara realisasi dan anggaran tahun ke					rasio antar realisasi dan anggaran tahun ke					rata rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	anggaran	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4,440,000	11,040,000	20,710,000	7,670,000	5,880,000	3,741,000	9,365,910	8,034,700	1,710,000	4,137,500	0.84	0.85	0.39	0.22	0.7	10,965,000	5,712,903
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	256,080,000	1,114,182,600	1,143,109,350	390,084,000	718,759,500	216,879,966	935,291,824	1,028,523,299	313,123,259	497,058,605	0.85	0.84	0.9	0.8	0.69	725,863,988	623,454,587
JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	0	0	0	572,772,500	869,160,000	0	0	0	571,500,000	704,880,000	0	0	0	1	0.81	143,193,125	142,875,000
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	0	456,388,000	525,043,000	0	0	0	442,100,000	496,263,000	0	0	0	0.97	0.95	0	0	245,357,750	234,590,750
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	291,150,000	529,100,000	817,020,000	0	869,160,000	288,045,670	525,453,404	809,230,000	0	704,880,000	0.99	0.99	0.99	0	0.81	409,317,500	405,682,269
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	200,925,400	960,272,519	990,724,718	142,038,779	278,607,377	200,862,050	957,537,390	986,429,228	141,816,128	257,744,630	1	1	1	1	0.93	573,490,354	571,661,199
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	213,891,900	228,892,450	443,552,969	274,995,330	398,656,586	213,786,112	228,877,350	442,507,694	274,858,969	340,780,555	1	1	1	1	0.85	290,333,162	290,007,531
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	89,125,000	140,075,000	162,726,750	150,777,750	256,327,750	88,924,660	139,805,000	158,762,871	149,758,550	227,528,377	1	1	0.98	0.99	0.89	135,676,125	134,312,770
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	84,134,700	194,850,160	245,762,832	95,199,150	146,360,298	84,134,700	191,273,620	204,474,652	86,243,350	114,697,000	1	0.98	0.83	0.91	0.78	154,986,711	141,531,581
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12,000,000	33,000,000	61,525,000	68,000,000	51,800,000	11,500,000	28,238,181	43,862,000	57,374,900	15,750,000	0.96	0.86	0.71	0.84	0.3	43,631,250	35,243,770
PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	0	978,228,944	1,180,180,888	28,800,000	304,400,000	0	929,285,032	1,147,410,600	21,780,000	96,392,600	0	0.95	0.97	0.76	0.32	546,802,458	524,618,908
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	270,381,700	348,950,000	2,615,880,000	1,339,160,000	1,271,050,000	268,075,200	334,076,423	2,219,970,197	1,338,933,032	1,025,145,525	0.99	0.96	0.85	1	0.81	1,143,592,925	1,040,263,713
PENYEDIAAN JASA PENINGKATAN PELAYANAN RS	0	1,230,690,000	1,803,400,000	0	0	0	1,089,010,000	1,551,560,000	0	0	0	0.88	0.86	0	0	758,522,500	660,142,500
PENGLOLAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	301,500,000	390,420,000	153,840,000	309,480,000	137,466,250	294,075,000	386,255,000	147,230,000	303,191,500	107,495,250	0.98	0.99	0.96	0.98	0.78	288,810,000	282,687,875

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	0	1,513,805,000	629,160,000	0	433,700,000	0	1,471,190,000	627,550,000	0	94,675,000	0	0.97	1	0	0.22	535,741,250	524,685,000
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	0	411,700,000	0	0	1,030,000,000	0	276,462,350	2,101,144,000	0	1,025,000,000	0	0.67	0	0	1	102,925,000	594,401,588
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	0	412,550,000	2,122,200,000	3,740,054,400	1,506,080,000	0	401,863,800	253,206,000	3,625,460,293	104,039,470	0	0.97	0.12	0.97	0.07	1,568,701,100	1,070,132,523
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	422,300,000	0	0	0	0	383,708,000	0	0	0	0	0.91	0	0	0	0	105,575,000	95,927,000
PENGADAAN PERLENGKAPAN PASIEN	0	136,850,000	255,480,000	0	0	0	136,670,000	956,876,400	0	0	0	1	3.75	0	0	98,082,500	273,386,600
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	481,614,000	687,650,000	715,650,000	2,674,000,000	945,200,000	480,790,000	663,788,300	707,450,000	2,639,673,670	692,681,405	1	0.97	0.99	0.99	0.73	1,139,728,500	1,122,925,493
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	597,078,600	852,575,000	1,029,280,000	864,730,000	825,520,000	576,330,500	775,059,070	266,260,000	790,387,429	564,851,213	0.97	0.91	0.26	0.91	0.68	835,915,900	602,009,250
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	35,050,000	46,400,000	61,650,000	93,950,000	328,055,000	35,000,000	40,127,000	80,310,000	83,156,900	232,818,960	1	0.86	1.3	0.89	0.71	59,262,500	59,648,475
REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR	0	0	267,500,000		252,860,000	0	0	266,260,000	0	97,977,000	0	0	1	0	0.39	89,166,667	66,565,000
TATA LAKSANA ASET	0	0	84,575,000	69,575,200	53,500,000	0	0	80,310,000	69,258,600	28,065,000	0	0	0.95	1	0.52	38,537,550	37,392,150
PENATALAKSANAAN DAN SINKRONISASI ADMINISTRASI	0	0	38,995,000	70,340,000	26,650,000	0	0	37,470,000	64,315,000	24,200,000	0	0	0.96	0.91	0.91	27,333,750	25,446,250
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																	
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	0	106,125,000	671,566,000	0	86,850,000	0	97,610,000	659,616,900	0	57,915,000	0	0.92	0.98	0	0.67	194,422,750	189,306,725
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	0	0	0	0	100,686,000	0	0	0	0	82,440,000	0	0	0	0	0.82	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	0	0	375,000,000	100,000,000	0	0	0	354,091,000	89,677,000	0	0	0	0.94	0.9	0	118,750,000	110,942,000
PELATIHAN BASIC TRAUMA CARDIAC LIFE (BTCLS)	0	0	107,350,000	0	0	0	0	107,350,000	0	0	0	0	1	0	0	26,837,500	26,837,500
UPAYA PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN MUTU ASKEP	0	0	59,220,000	0	0	0	0	59,220,000	0	0	0	0	1	0	0	19,740,000	14,805,000
PENGEMBANGAN SDM	0	330,000,000	0	0	0	0	310,587,292	0	0	0	0	0.94	0	0	0	82,500,000	77,646,823
BIMBINGAN TEKNIS ASUHAN KEPERAWATAN TENAGA PERAWAT	0	67,375,000	0	0	0	0	65,310,000	0	0	0	0	0.97	0	0	0	16,843,750	16,327,500
PENGLOLAAN BLOOD PUSKESMAS	0	96,713,000	0	0	0	0	96,594,328	0	0	0	0	1	0	0	0	24,178,250	24,148,582

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	0	93,150,000	250,428,860	130,550,000	100,686,000	0	91,940,000	239,427,000	126,060,000	82,440,000	0	0.99	0.96	0.97	0.82	118,532,215	114,356,750
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	0	0	43,450,000	41,158,054	0	0	0	43,050,000	40,333,054	0	0	0	0.99	0.98	0	21,152,014	20,845,764
PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN DINAS KESEHATAN	71,640,000	0	0	0	0	68,838,000	0	0	0	0	0.96	0	0	0	0	17,910,000	17,209,500
PENERIMAAN PUSKESMAS	226,300,000	392,297,000	113,700,000	94,920,000	0	225,905,000	386,702,000	111,300,000	94,840,000	0	1	0.99	0.98	1	0	206,804,250	204,686,750
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN																	
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI RUMAH SAKIT	0	0	77,750,000	0	0	0	0	77,050,000	0	0	0	0	0.99	0	0	19,437,500	19,262,500
PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	3,734,790,000	2,428,000,000	1,154,150,000	2,618,612,000	3,778,996,200	3,668,452,372	2,417,382,952	1,109,655,619	2,584,809,455	2,604,373,446	0.98	1	0.96	0.99	0.69	2,483,888,000	2,445,075,100
PENINGKATAN PENGETAHUAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	12,000,000	0	0	0	12,800,000	12,000,000	0	0	0	12,800,000	1	0	0	0	1	3,000,000	3,000,000
PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM DAN RONTGEN	0	1,659,338,435	0	0	0	0	1,656,885,000	0	0	0	0	1	0	0	0	414,834,609	414,221,250
PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	23,850,000	0	0	0	0	23,850,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5,962,500	5,962,500
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	18,180,000	0	129,630,000	147,670,000	73,760,000	17,120,000	0	115,090,000	142,260,000	57,510,000	0.94	0	0.89	0.96	0.78	73,870,000	68,617,500
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN RSUD BLUD	0	17,930,697,533	24,159,396,567	10,842,412,669	14,777,704,710	0	17,888,700,304	22,542,191,782	9,477,741,893	4,604,264,985	0	1	0.93	0.87	0.31	13,233,126,692	12,477,158,495
PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	0	2,319,727,012	9,266,232,206	0	0	0	1,856,288,220	755,389,777	0	0	0	0.8	0.08	0	0	2,896,489,805	652,919,499
PENGGALANGAN DONOR DARAH	0	142,250,000	144,050,000	0	0	0	140,065,000	129,050,000	0	0	0	0.98	0.9	0	0	71,575,000	67,278,750
PEMBANGUNAN PUSKESMAS DAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN (DAK)	0	4,183,295,000	2,500,000,000	5,491,155,000	29,877,599,000	0	4,067,644,104	2,446,399,018	5,436,394,452	26,496,431,661	0	0.97	0.98	0.99	0.89	3,043,612,500	2,987,609,394
P2WKSS /KAMPANYE GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0	0	179,443,000	0	0	0	0	1	0	0
PEMBANGUNAN /PENINGKATAN PUSKESMAS	0	0	4,902,901,750	0	0	0	0	4,835,959,500	0	0	0	0	0.99	0	0	1,225,725,438	1,208,989,875
PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	23,300,000	0	0	0	0	23,029,500	0	1,369,136,215	0	0	0.99	0	0	0	0	5,825,000	348,041,429
PENGEMBANGAN KEHATAN OLAH RAGA UNTUK KEBUGARAN JAMA'AH HAJI	0	0	0	0	9,100,000	0	0	0	0	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0
PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN SEHAT	50,300,000	0	2,834,883,000	0	60,000,000	50,200,000	0	2,834,644,293	0	25,297,800	1	0	1	0	0.42	721,295,750	721,211,073
PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	3,537,950,000	3,731,950,000	3,880,550,000	5,484,800,000	6,720,000,000	3,526,350,000	3,729,225,000	3,879,800,000	5,472,900,000	5,445,010,000	1	1	1	1	0.81	4,158,812,500	4,152,068,750
BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN (BOK)	0	0	0	13,248,003,000	0	0	0	0	12,846,523,888	0	0	0	0	0.97	0	3,312,000,750	3,211,630,972
PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	0	0	0	1,375,730,000	220,999,000	0	0	0	100,746,800	149,022,576	0	0	0	0.07	0.67	343,932,500	25,186,700
SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT	0	0	0	0	41,790,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0.05	0	0
PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT AKIBAT DAMPAK ASAP ROKOK	653,799,200	275,283,250	266,898,788	0	0	639,168,200	258,924,250	250,745,950	0	0	0.98	0.94	0.94	0	0	298,995,310	287,209,600
PENYEDIAAN PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA PENYAKIT AKIBAT DAMPAK KONSUMSI ROKOK DAN PENYAKIT LAINNYA (DBHCHT)	0	0	0	260,180,000	117,656,758	0	0	0	260,180,000	68,833,000	0	0	0	1	0.59	65,045,000	65,045,000
PENANGGULANGAN STUNTING (DAK PENUKASAB)	0	0	0	0	191,999,000	0	0	0	0	179,995,200	0	0	0	0	0.94	0	0
PROMOSI KESEHATAN	2,077,977,500	4,329,849,950	0	0	0	1,795,516,641	4,084,279,190	0	0	0	0.86	0.94	0	0	0	1,601,956,863	1,469,948,958
PENYULUHAN MASYARAKAT DALAM RANGKA LOMBA PHBS	0	0	0	0	837,500	0	0	0	0	837,500	0	0	0	0	1	0	0
PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	0	0	0	0	143,500,000	0	0	0	0	69,940,000	0	0	0	0	0.49	0	0
PERTEMUAN EVALUASI OPERASIONAL KESEHATAN	69,080,000	75,201,655	0	0	0	68,657,000	74,088,000	0	0	0	0.99	0.99	0	0	0	36,070,414	35,686,250
PEMUCUAN CLTS	36,930,000	0	0	0	0	36,920,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9,232,500	9,230,000
PEMBINAAN POS UKK/TEMPAT KERJA	0	0	0	0	9,725,000	0	0	0	0	8,800,000	0	0	0	0	0.9	0	0
PENGADAAN OBAT & SARANA PRASARANA INSTALASI FARMASI (DAK FARMASI)	0	2,792,000,000	2,834,883,000	4,875,939,000	1,718,370,000	0	2,777,930,997	2,834,664,293	4,836,069,963	860,606,253	0	0.99	1	0.99	0.5	2,625,705,500	2,612,166,313
AKREDITASI PUSKESMAS	0	0	1,392,086,666	859,301,000	931,132,000	0	0	1,305,667,453	821,605,300	111,476,700	0	0	0.94	0.96	0.12	562,846,917	531,818,188
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)	0	2,977,172,800	3,372,009,889	2,171,000,000	1,644,809,000	0	1,141,321,506	1,369,136,215	877,524,284	997,879,359	0	0.38	0.41	0.4	0.61	2,130,045,672	846,995,501
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN RSUD BLUD	0	17,930,697,533	24,159,396,567	0	0	0	17,888,700,304	22,542,191,782	0	0	0	1	0.93	0	0	10,522,523,525	10,107,723,022
OPERASIONAL KESEHATAN / PUSKESMAS	3,760,000,000	7,387,568,000	11,612,137,000	0	16,342,191,000	3,709,299,200	6,867,752,060	11,272,793,973	0	13,220,993,706	0.99	0.93	0.97	0	0.81	5,689,926,250	5,462,461,308
OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS/E-LOGISTIK DAK NON FISIK	0	0	0	0	177,286,000	0	0	0	0	108,595,633	0	0	0	0	0.61	0	0
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (NON FISIK)	0	0	0	0	175,552,000	0	0	0	0	126,032,000	0	0	0	0	0.72	0	0

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	
PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	0	0	246,800,000	319,250,000	143,500,000	0	0	235,575,000	299,245,000	69,940,000	0	0	0.95	0.94	0.49	141,512,500	133,705,000
PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	41,700,000	0	51,120,000	82,822,711	0	41,505,000	0	24,235,000	72,082,900	0	1	#DIV/0!	0.47	0.87	0	43,910,678	34,455,725
SOSIALISASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DESA SIAGA/POSYANDU	0	0	61,050,000	0	0	0	0	53,325,000	0	0	0	0	0.87	0	0	15,262,500	13,331,250
LOMBA PHBS	0	0	65,875,000	0	837,500	0	0	65,275,000	0	837,500	0	0	0.99	0	1	16,468,750	16,318,750
P2WKSS/KAMPANYE GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	0	0	219,900,000	192,767,750	0	0	0	218,002,000	183,695,600	0	0	0	0.99	0.95	0	103,166,938	100,424,400
PEMBERDAYAAN / PENGGERAKKAN MASYARAKAT PERTEMUAN POSKESTREN	31,250,000	0	0	0	0	31,135,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7,812,500	7,783,750
PELAYANAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH(UKS)	0	0	27,838,500	0	0	0	0	27,838,500	0	0	0	0	1	0	0	6,959,625	6,959,625
PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT (PIS)	0	0	66,858,000	0	0	0	0	58,693,000	0	0	0	0	0.88	0	0	16,714,500	14,673,250
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN DESA / KELUARGA SIAGA AKTIF	28,000,000	0	61,050,000	0	0	27,925,000	0	53,325,000	0	0	1	0	0.87	0	0	22,262,500	20,312,500
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT																	
PENANGGULANGANKURANG YODIUM KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI,GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY),KURANG VITAMIN A,DAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA	53,460,000	0	72,700,000	108,300,000	121,850,000	53,460,000	0	72,700,000	96,600,000	133,750,000	1	0	1	0.89	1.1	58,615,000	55,690,000
PENANGGULANGAN ANEMIA BUMIL DAN BUFAS	38,300,000	0	54,825,000	54,750,000	0	38,250,000	0	41,325,000	50,700,000	0	1	0	0.75	0.93	0	36,968,750	32,568,750
MONITORING ,EVALUASI DAN PELAPORAN KELUARGA SADAR GIZI	0	0	17,932,500	0	0	0	0	14,622,500	0	0	0	0	0.82	0	0	4,483,125	3,655,625
PENINGKATAN PENGGUNAAN ASI DIMASYARAKAT	0	0	32,195,000	0	0	0	0	26,045,000	0	0	0	0	0.81	0	0	8,048,750	6,511,250
PEMBENTUKAN PUSAT GIZI MASYARAKAT	0	0	168,395,000	0	0	0	0	156,044,500	0	0	0	0	0.93	0	0	42,098,750	39,011,125
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR																	
PENYEMPROTAN / FOGGING SARANG NYAMUK	189,180,000	46,700,000	248,100,000	190,585,000	202,780,000	188,670,000	46,600,000	247,200,000	182,915,000	88,281,000	1	1	1	0.96	0.44	168,641,250	166,346,250
PENUSNAHAN / KARANTINA SUMBER PENYEBAB PENYAKIT MENULAR TERTENTU	109,950,000	0	249,125,000	154,345,000	84,650,000	107,817,290	0	247,214,500	133,705,000	33,620,000	0.98	0	0.99	0.87	0.4	128,355,000	122,184,198
PENINGKATAN IMUNISASI	106,750,000	0	229,930,000	76,746,750	6,500,000	106,400,000	0	228,945,500	70,405,000	5,400,000	1	0	1	0.92	0.83	103,356,688	101,437,625
PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH	23,250,000	0	97,520,000	27,650,000	13,000,000	19,000,000	0	97,520,000	11,650,000	1,300,000	0.82	0	1	0.42	0.1	37,105,000	32,042,500
PELAYANAN BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH	18,350,000	0	0	0	0	18,300,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4,587,500	4,575,000
PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK	0	0	54,995,000	69,835,000	0	0	0	54,510,000	55,541,800	0	0	0	0.99	0.8	0	31,207,500	27,512,950
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN ISPA	0	0	20,310,000	24,540,000	0	0	0	20,310,000	16,860,000	0	0	0	1	0.69	0	11,212,500	9,292,500
PENETAPAN KEGIATAN PTM(CERDIK)	0	0	80,345,000	52,830,000	20,250,000	0	0	80,145,000	47,332,000	17,000,000	0	0	1	0.9	0.84	33,293,750	31,869,250
PENATALAKSAAN KESEHATAN JIWA BAGI PETUGAS PUSKESMAS	0	0	48,710,000	25,830,000	9,800,000	0	0	48,210,000	25,830,000	7,200,000	0	0	0.99	1	0.73	18,635,000	18,510,000

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN																	
PENGLOLAAN SIM RS	0	0	122,400,000	0	0	0	0	112,800,000	0	0	0	0	0.92	0	0	30,600,000	28,200,000
PENGLOLAAN PERENCANAAN DAN KEGIATAN RS	0	0	103,700,000	0	0	0	0	96,500,000	0	0	0	0	0.93	0	0	25,925,000	24,125,000
PELAKSANAAN AKREDITASI RUMAH SAKIT	0	209,385,000	320,459,700	0	0	0	183,209,800	225,937,400	0	0	0	0.87	0.71	0	0	132,461,175	102,286,800
AKREDITASI PUSKESMAS (DAK)	0	919,807,250	0	0	0	0	808,741,750	0	0	0	0	0.88	0	0	0	229,951,813	202,185,438
EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN KESEHATAN	57,608,000	0	89,200,000	98,724,050	57,193,333	57,447,600	0	88,750,000	72,422,450	49,446,380	1	0	0.99	0.73	0.86	61,383,013	54,655,013
KOPETENSI TIM PENILAI TENAGA DALAM JABATAN FUNGSIONAL	0	0	153,550,000	74,160,000	91,750,000	0	0	152,550,000	66,880,000	89,000,000		0	0.99	0.9	0.97	56,927,500	54,857,500
PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA SDMK	86,740,000	0	153,550,000	42,290,000	17,500,000	86,357,500	0	152,500,000	41790000	14750000	1	0	0.99	0.99	0.84	70,645,000	70,161,875
PENYEDIAAN JASA TENAGA MEDIS	0	0	996,000,000	984,000,000	985,500,000	0	0	996,000,000	984,000,000	820,000,000	0	0	1	1	0.83	495,000,000	495,000,000
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	510,886,000	72,745,000	0	0	0	499,367,000	71,198,500	0	0	0	0.98	0.98	0	0	0	145,907,750	142,641,375
PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR	85,805,200	0	0	0	109,501,663	84,463,900	0	0	0	93,975,700	0.98	0	0	0	0.86	21,451,300	21,115,975
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN																	
PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DAN PUSKESMAS BERPRESTASI	0	0	90,445,000	112,505,000	131,440,000	0	0	75,635,000	109,425,000	130,585,000	0	0	0.84	0.97	0.99	50,737,500	46,265,000
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAH TERPENCIL	0	0	54,125,000	41,197,660	67,689,400	0	0	49,365,000	39,197,660	64,604,400	0	0	0.91	0.95	0.95	23,830,665	22,140,665
PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT TRADISIONAL	0	0	42,290,000	0	7,450,000	0	0	35,560,000	0	5,400,000	0	0	0.84		0.72	10,572,500	8,890,000
PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS	0	0	126,875,000	167,717,200	7,500,000	0	0	124,600,000	149,745,900	5,400,000	0	0	0.98	0.89	0.72	73,648,050	68,586,475
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI RUMAH SAKIT																	
WORK SHOP PPI PETUGAS RS	0	0	38,202,500	0	0	0	0	16,350,000	0	0	0	0	0.43	0	0	9,550,625	4,087,500
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUJUKAN RS	0	0	83,750,000	106,698,501	143,448,501	0	0	72,900,000	86,802,502	57,825,800	0	0	0.87	0.81	0.4	47,612,125	39,925,626
PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR	0	0	57,900,000	0	0	0	0	57,500,000	0	0	0	0	0.99		0	14,475,000	14,375,000
PENATALAKSANAAN DAN PEMETAAN ALAT KESEHATAN ALAT KESEHATAN SESUAI STANDAR	0	0	157,625,000	131,801,720	8,819,700	0	0	151,150,000	131,800,000	7,619,700	0	0	0.96	1	0.86	72,356,680	70,737,500
PERTEMUAN EVALUASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SDM KESEHATAN	0	0	27,650,000	26,155,000	43,500,000	0	0	25,250,000	26,015,000	35,250,000	0	0	0.91	0.99	0.81	13,451,250	12,816,250
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN																	
PELAYANAN KESEHATAN AKIBAT LUMPUH LAYUH	10,100,000	0	10,400,000	10,400,000	0	1,695,000	0	4,277,000	1,400,000	0	0.17	0	0.41	0.13	0	7,725,000	1,843,000
PELAYANAN PASIEN JAMKESMAS DAN JAMKESDA	4,367,600,000	0	5,463,150,724	5,561,172,000	5,528,090,679	4,291,206,712	0	5,389,151,630	3,152,332,474	2,600,309,700	0.98	0	0.99	0.57	0.47	3,847,980,681	3,208,172,704
PELAYANAN KAPITASI DAN NON KAPITASI	10,633,716,957	9,159,371,230	8,067,533,873	0	0	8,527,617,239	8,035,909,935	7,262,961,180	0	0	0.8	0.88	0.9	0	0	6,965,155,515	5,956,622,089
PELAYANAN PASIEN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMKESDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT	0	4,505,447,811	0	0	0	0	4,483,905,011	0	0	0	0	1	0	0	0	1,126,361,953	1,120,976,253
PERTEMUAN LINTAS SEKTOR JAMKESDA	0	0	0	55,990,000	17,750,000	0	0	0	43,133,040	17,500,000	0	0	0	0.77	0.99	13,997,500	10,783,260
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA																	
RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/																	
RUMAH SAKIT MATA																	
PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT	0	1,106,830,750	0	0	0	0	1,083,179,152	16,350,000	0	0	0	0.98	0	0	0	276,707,688	274,882,288
PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT	0	92,417,000	205,062,000	0	0	0	91,826,500	204,035,000	0	0	0	0.99	0.99	0	0	74,369,750	73,965,375
PENGLOLAAN REKAM MEDIS RS	0	369,000,000	671,843,750	0	0	0	367,400,000	642,093,750	0	0	0	1	0.96	0	0	260,210,938	252,373,438
PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT	0	439,100,000	475,500,000	0	0	0	433,962,000	474,726,000	0	0	0	0.99	1	0	0	228,650,000	227,172,000
PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	0	4,626,355,000	2,500,000,000	0	0	0	4,597,330,393	2,484,112,000	0	0	0	0.99	0.99	0	0	1,781,588,750	1,770,360,598
PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT (DAK)	0	0	6,042,057,000	0	0	0	0	5,988,879,648	0	0	0	0	0.99	0	0	1,510,514,250	1,497,219,912

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU-PARU / RUMAH SAKIT MATA																		
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA RUMAH SAKIT	0	532,600,000	657,550,000	0	0	0	493,825,950	606,248,500	0	0	0	0.93	0.92	0	0	297,537,500	275,018,613	
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	0	322,500,000	370,500,000	0	0	0	299,758,691	369,956,290	0	0	0	0.93	1	0	0	173,250,000	167,428,745	
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA LINGKUNGAN RUMAH SAKIT	0	361,455,000	210,600,000	0	0	0	345,620,972	207,455,000	0	0	0	0.96	0.99	0	0	143,013,750	138,268,993	
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA																		
PEMBANGUNAN PUSKESMAS (DAK)	1,405,106,000	0	0	0	0	1,401,561,000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	351,276,500	350,390,250	
IMUNISASI (DAK)	0	0	292,660,000	0	0	0	0	155,898,580	0	0	0	0	0.53	0	0	73,165,000	38,974,645	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN																		
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH TANGGA	18,745,000	0	0	0	0	14,465,000	0	0	0	0	0.77	0	0	0	0	4,686,250	3,616,250	
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN																		
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH TANGGA	0	0	0	83,170,000	0	0	0	0	77,640,000	0	0	0	0	0.93	0	20,792,500	19,410,000	
PENINGKATAN PENGETAHUAN KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	0	0	0	45,115,000	0	0	0	0	41,425,000	0	0	0	0	0.92	0	11,278,750	10,356,250	
PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	0	0	0	115,895,000	0	0	0	0	94,850,000	0	0	0	0	0.82	0	28,973,750	23,712,500	
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK																		
OTOPSI VERBAL DAN AMP (AUDIT MATERNAL PRONATAL	0	0	93,700,000	73,660,000	0	0	0	89,820,000	73,660,000	0	0	0	0.96	1	0	41,840,000	40,870,000	
PERTEMUAN PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT KESEHATAN IBU DAN ANAK (PWS-KIA)	367,800,000	0	84,295,000	103,240,000	81,064,000	367,015,000	0	82,795,000	103,240,000	80,264,000	1	0	0.98	1	0.99	138,833,750	138,262,500	
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATANBAYI BARU LAHIR	0	0	89,432,500	105,362,500	0	0	0	89,432,500	105,192,500	0	0	0	1	1	0	48,698,750	48,656,250	
PELATIHAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT	0	0	68,880,000	0	0	0	0	68,520,000	0	0	0	0	0.99	0	0	17,220,000	17,130,000	
PERTEMUAN ANC TERPADU	0	0	0	0	63,367,500	0	0	0	0	63,244,000	0	0	0	0	99.81	0	0	
PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN																		
PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DAN PUSKESMAS	63,860,000	0	0	0	0	57,160,000	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	15,965,000	14,290,000	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH																		
PEMBANGUNAN SUMUR BOM DALAM	464,200,000	0	0	0	0	454,520,000	0	0	0	0	0.98	0	0	0	0	116,050,000	113,630,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI																		
PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN KEGIATAN RS	0	192,100,000	0	0	0	0	192,100,000	0	0	0	0	1	0	0	0	48,025,000	48,025,000	
PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	0	0	94,929,258	83,324,000	0	0	0	72,359,250	77,573,800	0	0	0	0.76	0.93	0	44,563,315	37,483,263	
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT																		
SOSIALISASI KEBELAJAN LINGKUNGAN SEHAT	0	0	88,450,000	51,880,000	0	0	0	82,200,000	10,250,000	0	0	0	0.93	0.2	0	35,082,500	23,112,500	
PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	0	0	101,900,000	10,010,000	0	0	0	94,700,000	8,640,000	0	0	0	0.93	0.86	0	27,977,500	25,835,000	
PENGEMBANGAN CLTS UNTUK KEBUGARAN ANAK SD DAN JAMA'AH HAJI	0	0	120,400,000	65,800,000	0	0	0	63,078,500	65,800,000	0	0	0	0.52	1	0	46,550,000	32,219,625	
PEMBINAAN POS UKK/TEMPAT KERJA	0	0	74,250,000	53,350,000	0	0	0	74,250,000	49,350,000	0	0	0	1	0.93	0	31,900,000	30,900,000	
PEMUCUAN CLTS (COMMUNITY LED TOTAL SANITASI)	0	0	0	48,000,000	0	0	0	0	47,500,000	0	0	0	0	0.99	0	12,000,000	11,875,000	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tugas dari Dinas kesehatan dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan Kesehatan

Untuk penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan **Bidang Kesehatan** memiliki beberapa **tantangan** sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar .
 - Beberapa bangunan Puskesmas yang belum sesuai dengan prototype Pembangunan Puskesmas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - Prasarana, Alat Kesehatan dan obat-obatan dalam mendukung Pelayanan Kesehatan belum terpenuhi sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019.
 - Masih kurangnya SDM Kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit yang sesuai dengan kebutuhan .
 - Masih kurangnya kompetensi dan kemampuan petugas .
2. Adanya Kejadian Luar Biasa dan Bencana Alam.
3. Perubahan status puskesmas menjadi Puskesmas BLUD membutuhkan kesiapan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan belum Optimal karena kurangnya Pengetahuan dan kesadaran Masyarakat .
5. Masih adanya sebagian masyarakat yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan dan terletak pada daerah sulit jangkauan, sehingga masyarakat belum mendapatkan pelayanan secara maksimal.
6. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor belum optimal.
7. Belum semua Masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan dan terdapat masyarakat miskin belum memiliki jaminan Kesehatan karena data belum valid.

Adapun **peluang** yang akan mendukung pengembangan pelayanan yang akan dilakukan di **Bidang Kesehatan** yaitu :

1. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk pemenuhan baik sarana prasarana maupun kegiatan kegiatan program .
2. Status Puskesmas menjadi BLUD yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan

3. Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari 2 RSUD, 16 Puskesmas , 1 Instalasi Farmasi, 71 Pustu, PSC 119, sehingga mendekatkan akses Pelayanan.
4. Adanya kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan pelayanan dan mendekatkan akses Pelayanan kesehatan dalam hal pembangunan Poskesdes (Pos kesehatan Desa), Posyandu , Posbindu, Poslansia , Pos TB, Poskestren, Pos UKK ,Saka Bakti Husada, Kader Kesehatan.
5. Adanya Alokasi dana anggaran kesehatan dari pemerintah pusat dan daerah .
6. Adanya bantuan Dana pemerintah Pusat dan daerah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan seperti dokter Umum menjadi dokter Spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.
7. Kemudahan dalam komunikasi (whatsapp, internet dalam penanggulangan masalah kesehatan dan koordinasi dengan lintas sektor

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Pembangunan Bidang kesehatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat, pelayanan kesehatan yang terus menerus diberikan oleh semua tenaga kesehatan disemua wilayah kerjanya masing-masing baik yang berada diperkotaan maupun di Pedesaan. Namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi baik dari faktor lingkungan atau geografis maupun kebijakan-kebijakan dalam upaya optimalisasi pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu :

- (1) Mutu dan pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar hal ini disebabkan;
 - a. Masih kurangnya SDM medis khususnya dokter Spesialis d rumah sakit.
 - b. Masih kurangnya Gedung Pelayanan kesehatan rawat inap dan instalasi penunjang di rumah Sakit.
 - c. Masih adanya bangunan Puskesmas yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019
 - d. Manajemen Perencanaan Puskesmas belum berbasis ASPAK dalam pemenuhan Sarana Prasarana.
 - e. Masih adanya kekurangan Sumber daya kesehatan, obat-obatan, vaksin serta BMHP untuk pelayanan kesehatan dalam pemenuhan obat dan vaksin serta BMHP.
 - f. Belum semua puskesmas memenuhi kesesuaian jenis dan jumlah alat kesehatan dibandingkan dengan kebutuhan alat Puskesmas.
 - g. Masih rendahnya mutu inventarisasi barang di puskesmas dengan bukti serah terima barang.
 - h. Masih adanya puskesmas yang belum memahami dan merencanakan kebutuhan alat kesehatan berbasis aplikasi ASPAK

- i. Puskesmas belum memahami mekanisme kalibrasi sehingga masih banyak peralatan yang belum dilakukan kalibrasi
 - j. Masih ditemukan petugas puskesmas yang belum memahami dan menjalankan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan
 - k. Perencanaan kebutuhan tenaga dan pengelolaan tenaga kesehatan belum optimal baik dari metode yang digunakan maupun akurasi data.
 - l. Belum terpenuhinya 9 jenis SDM kesehatan di setiap Puskesmas
- (2) Masih terdapat Angka Kematian ibu dan neonatal sehingga Capaian Persalinan Nakes baru mencapai 85,63%, capaian AKI 2021 baru mencapai 87,7/100.000 KLH, IPK 2024 183 per 100.000 klh. Capaian AKN 2021 6,8/1000 KLH,
- (3) Percepatan penurunan Prevalensi stunting belum tercapai disebabkan :
- a. Kualitas dan kuantitas pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat belum memadai.
 - b. Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum optimal.
 - c. Sulitnya melaksanakan perubahan perilaku dimasyarakat karena banyaknya mitos dan tradisi yang melekat.
- (4) Masih sulitnya membudayakan Perilaku hidup sehat melalui germas karena :
- a. Belum semua kecamatan yang menerapkan kebijakan germas.
 - b. Jumlah posyandu aktif tahun 2021 54,9% (163 posyandu)
 - c. Minimal posyandu Aktif 80%
 - d. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat belum maksimal (infrastruktur)
 - e. Capaian Persentase Desa ODF tahun 2021 18,66%(25 desa) target 60% kabupaten Sehat.
- (5) Belum Tercapainya penyelenggaraan surveilans dengan mengintegrasikan dalam system surveilans penyakit menular dan tidak menular di fasilitas kesehatan dan masyarakat, hal ini disebabkan :
- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sehingga dapat terhindar dari faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, belum maksimalnya kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait, advokasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan terkait. jangkauan akses masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan yang belum berkualitas, sumber daya kesehatan yang masih kurang serta belum terpenuhinya barang habis pakai sesuai sasaran.

- (6) Masih kurangnya cakupan imunisasi lengkap hal ini disebabkan masih terdapat 31 desa pada tahun 2021 yang tidak mencapai UCI (Universal Children Immunisation)
- (7) Belum semua masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan Jaminan kesehatan disebabkan masih ada masyarakat yang tidak masuk/terdaftar sebagaipenerima bantuan iuran (PBI).
- (8) Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu hamil, Pelayanan Kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan Kesehatan Balita (USIA 12-59 bulan) sesuai standar belum tercapai hal ini disebabkan penguatan koordinasi dan integrasi lintas sektor belum maksimal.
- (9) Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar belum tercapai hal ini mengakibatkan nakes mengalami kesulitan dalam menjangkau sasaran anak usia pendidikan dasar terkait wabah pandemic Covid-19 yang mengharuskan penerapan belajar during (belajar jarak jauh).
- (10) Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia Produktif (15-59 tahun) sesuai standar sehingga masih rendahnya cakupan kesehatan pada usia produktif, target tahun 2021 adalah 100% dengan jumlah jumlah 216.604 jiwa yang terealisasi sebanyak 82,47 % dengan jumlah 178.641 jiwa dan jumlah POSBINDU di tahun 2021 sebanyak 118 dari 134 desa/kelurahan, POSBINDU KIT yang tersedia adalah hanya 114 KIT serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan terutama penyakit tidak menular seperti hipertensi, DM dan Kanker Leher Rahim
- (11) Cakupan Pelayanan kesehatan Pada usia lanjut (60 tahun atau lebih) sesuai standar belum tercapai hal ini disebabkan adanya wabah COVID-19 membuat kegiatan program Lansia harus di tunda sementara waktu dikarenakan lansia masuk dalam kelompok usia rentan .
- (12) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi sesuai standar belum tercapai sehingga masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan hipertensi, target tahun 2021 sebanyak 100% dengan jumlah 80.113 jiwa yang terealisasi sebanyak 77,98 % dengan jumlah 62.476 jiwa.
- (13) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM) sesuai standar belum tercapai hal ini disebabkan masih rendahnya cakupan

pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM), target tahun 2021 sebanyak 100 % dengan jumlah estimasi 3.981 jiwa yang terealisasi dengan jumlah barang habis pakai (stik glukosa) 3302 jiwa

- (14) Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat sudah sesuai standar meningkatnya jumlah kasus ODGJ pada tahun 2021 sebanyak 376 orang menjadi 393 kasus pada tahun 2022
- (15) Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosisi sesuai standar belum tercapai disebabkan kurangnya SDM (tenaga laboratorium untuk pemeriksaan mikroskopis serta kurangnya kepatuhan minum obat serta tenaga mikroskopis terlatih dan sering terjadi diagnose yang positif/negative palsu.
- (16) Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV sesuai standar belum tercapai karena Pendataan kelompok populasi kunci factor resiko belum terdata secara pemetaan Missing case dan pengobatan yang tidak tepat waktu Kurangnya kerjasama antara KIA dengan P2P dalam skrining triple eliminasi

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Mutu dan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya SDM Medis khususnya Dokter Spesialis di Rumah Sakit ✓ Masih kekurangan gedung pelayanan kesehatan rawat inap dan instalasi penunjang di Rumah Sakit 	Pengalokasian dana yang belum terpenuhi
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih adanya bangunan Puskesmas yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 43 Tahun 2019. 	Pengalokasian dana yang belum terpenuhi
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manajemen Perencanaan Puskesmas belum berbasis ASPAK dalam pemenuhan sarana prasarana, sumber daya kesehatan serta obat-obatan, vaksin serta BMHP untuk pelayanan 	Pemahaman petugas masih rendah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		puskesmas dalam pemenuhan obat dan vaksin serta BMHP untuk pelayanan Puskesmas.	
		✓ Masih ditemukan ketidaksesuaian jenis dan jumlah alat kesehatan dibandingkan dengan kondisi di Puskesmas dan pada Inventaris barang	Pemahaman petugas masih rendah
		✓ Ketidaksesuaian antara penempatan barang di puskesmas dengan bukti serah terima barang dan ASPAK	System pencatatan inventaris barang yang belum valid
		✓ Pemahaman petugas di Puskesmas yang masih rendah dalam menggunakan aplikasi ASPAK	Kemampuan petugas rendah
		✓ Perencanaan alat Kesehatan di Puskesmas belum berbasis ASPAK	Proses Perencanaan tidak maksimal
		✓ Puskesmas belum memahami mekanisme kalibrasi sehingga masih banyak peralatan yang belum dilakukan kalibrasi	Pemahaman petugas masih rendah
		✓ Masih ditemukan petugas Puskesmas yang belum memahami dan memiliki kemampuan serta tanggap terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan masih ada yang belum sesuai standar pelayanan	✓ Kurang nya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik yang ditandai adanya protes dan demonstrasi oleh berbagai masyarakat

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		✓ Distribusi SDM Kesehatan sesuai Kompetensi ke Puskesmas belum merata	SDM Kesehatan masih kurang
		✓ Perencanaan kebutuhan tenaga dan pengelolaan tenaga kesehatan belum optimal baik dari metode yang digunakan maupun akurasi data. Perencanaan tahunan yang rutin disusun tidak pernah terealisasi.	Realisasi formasi belum memenuhi sesuai dengan kebutuhan
		✓ Belum terpenuhinya 9 jenis SDM Kesehatan di setiap Puskesmas	9 Jenis SDM Kesehatan masih kurang
	2. Status Kesehatan Ibu ,Bayi dan Anak Balita yang masih kurang .	<p>✓ Capaian Persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2021 baru mencapai 85,63%, capaian AKI 2021 87,7/100.000 KLH, IPK 2024 183 per 100.000 klh. Capaian AKN 2021 6,8/1000 KLH</p>	<p>✓ Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai.</p> <p>✓ Belum semua ibubersalin melahirkan di fasilitas kesehatan</p> <p>✓ Masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun</p> <p>✓ Belum semua ibu nifas mendapat layanan berkualitas</p> <p>✓ Belum semua neonatal mendapat pelayanan berkualitas</p> <p>✓ Pemanfaatan buku KIA</p>

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada Pengaruh antara tingkat pendidikan ibu pengetahuan ibu dan social budaya serta adat istiadat setempat
	3. Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Faktor Ekonomi ✓ Pengetahuan dan Pola Asuh yang Masih Kurang ✓ Pelaksanaan Konfergensi Penurunan Stunting dan Wasting Belum Optimal ✓ Pola Konsumsi yang Tidak Sesuai ✓ Sanitasi Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Banyaknya kejadian Pernikahan Dini ✓ Sulitnya Akses Ke Fasyankes Di Beberapa Daerah ✓ Kualitas Dan Kuantitas SDM Belum Memadai ✓ Koordinasi LP, LC Belum Optimal ✓ Pendapatan Masyarakat Yang Masih Relative Rendah (Angka Kemiskinan Masih Cukup Tinggi
	4. Pembudayaan Perilaku Hidup sehat melalui GERMAS.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum semua Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas . ✓ jumlah posyandu aktif tahun 2021 : 54,9% (163 posyandu) ✓ minimal posyandu aktif 80%. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya Pemahaman Dan Pengetahuan Kesehatan Masyarakat Tentang

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>GERMAS Dan Posyandu</p> <p>✓ Sulitnya Merubah Prilaku Masyarakat Untuk Hidup Sehat</p> <p>Disebabkan Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Serta Mitos Dan Tradisi Yang Masih Melekat Dimasyarakat</p> <p>✓ Penerapan / Pelasanaan GERMAS Dan Posyandu di Masyarakat Masih Belum Optimal</p>
	5. Menyelenggarakan Surveilans Dengan Mengintegrasikan Dalam Sistem Surveilans Penyakit Menular Dan Tidak Menular di Fasilitas Kesehatan Dan Masyarakat	✓ Kurang maksimalnya ketepatan dan kelengkapan laporan system pelaporan surveilans	✓ System pelaporan tidak tepat waktu
	6. Cakupan Imunisasi Lengkap	✓ Masih Terdapat 31 Desa Pada Tahun 2021 Yang Tidak Mencapai Uci (Universal Children Imunitation)	<p>✓ Ketersediaan Stock Vaksin masih terbatas</p> <p>✓ Kurangnya Motivasi</p>

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Orang Tua
	7. Jaminan Kesehatan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih Adanya Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Tidak Terdaftar Sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan ✓ Penerima Bantuan Iuran yang Telah Meninggal Dunia Tidak Telerpor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin Belum Optimal ✓ Belum semua data masyarakat miskin terlaporkan ke Dinas Sosial ✓ Kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa peserta PBI yang Meninggal Dunia Harus Dilaporkan ke BPJS Kesehatan dan Tembusan ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan
	8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nakes Mengalami Kesulitan Dalam Menjangkau Sasaran Anak Usia Pendidikan Dasar Terkait Wabah Pandemi Covid-19 Yang Mengharuskan Penerapan Belajar Daring (Belajar Jarak Jauh) Disamping Itu Ada Juga Instansi Pendidikan Dan Sasaran Yang Tidak Bersedia ✓ Pelayanan Kesehatan Pada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah dan Kompetensi SDM Masih kurang

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		usia Pendidikan dasar belum Optimal	
	9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih Rendahnya Cakupan Kesehatan Pada Usia Produktif, Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memeriksa Kesehatan Terutama Penyakit Tidak Menular Seperti Hipertensi, Dm Dan Kanker Leher Rahim 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum tercapainya target tahun 2020 sebanyak 100% Dengan Jumlah 220.988 Jiwa Yang Terealisasi Sebanyak 38,1% Dengan Jumlah 84.289 Jiwa ✓ Belum semua desa / Kelurahan Memiliki Posbindu
	10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Atau Lebih) Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya Wabah Covid-19 Membuat Kegiatan Program Lansia Harus Ditunda Sementara Waktu Dikarenakan Lansia Masih Dalam Kelompok Usia Rentan ✓ Pelaksanaan Pelayanan pada Lansia masih kurang Berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Tenaga Kesehatan
	11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih Rendahnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Hypertensi, 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih Kurangnya kesadaran Masyarakat Untuk memeriksa diri ke Faskes ✓ Tingkat kepatuhan minum obat masih kurang.

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Dm) Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih Rendahnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Dm), Target Tahun 2021 Sebanyak 100 % Dengan Jumlah Estimasi 3.981 Jiwa Yang Terealisasi 3302 jiwa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih Kurangnya kesadaran Masyarakat Untuk memeriksakan diri ke Faskes ✓ Tingkat kepatuhan minum obat masih kurang.
	13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odj) Berat Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatnya Jlh Kasus Odj Pada Tahun 2020 Sebanyak 376 Orang Menjadi 393 Kasus Pada Tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan jiwa masih rendah ✓ Stigma negative terhadap penderita Jiwa Sumber daya Pendukung Layanan Kesehatan Jiwa Masih terbatas
	14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SDM (Tenaga Laboratorium) Untuk Pemeriksaan Mikroskopis tidak tersebar di semua Puskesmas ✓ Kepatuhan Minum Obat Masih Kurang ✓ Hasil Diagnosa Yang Positif/Negatif Palsu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya tenaga laboratorium dan sarana mikroskopis (beberapa masih menggunakan mikroskop lama) ✓ Pemantau minum obat (PMO) belum memantau secara maksimal

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Hiv Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemetaan kelompok faktor resiko belum terdata secara optimal ✓ Missing case dan pengobatan tidak tepat waktu ✓ Kerjasama KIA dan P2 dalam screening ibu hamil masih belum optimal Pelayanan K1 KIA belum sinkron dengan screening Triple	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Faktor resiko LSL, Waria dan WPS tidak terdata secara maksimal Pasien yang ditemukan tidak melanjutkan AFv (missing case) / hilang

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2021 – 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta peraturan menteri dalam negeri RI nomor 54 tahun 2010 tentang kewajiban daerah dalam menyusun RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, Renja SKPD, serta RKPD. Dan Tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan.

3.2.1. Visi Kepala Daerah

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan wakil Bupati, maka Visi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026 yaitu :

Visi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “MEWUJUDKAN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH ” (Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Adapun makna yang terkandung dalam Visi yang sudah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut tersebut adalah:

No.	Visi	Penjabaran
1.	Berkualitas	Sumberdaya manusia berdaya saing,sehat dan inovatif agar dapat memberikan perubahan,perkembangan ,dan kemajuan bagi daerah
2.	Ekonomi Maju	Meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan,perkembangan,dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
3.	Religius	Berlandaskan nilai-nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur,dan tatanan kehidupan mabi masyarakat
4.	Kompetitif	Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional,dan internasional,dengan mengedepankan Sumberdaya unggulan daerah.
5.	Aman	Suasana aman dan tertib sehingga masyarakat nyaman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi
6.	Harmonis	Terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi,pemerintah kabupaten tetangga dan pemerintah pusat

3.2.2. Misi Kepala Daerah

Misi bupati dan wakil bupati terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan visi tersebut dapat dilihat Tabel sebagai berikut berikut :

NO	Misi	Tujuan	sasaran
1	Peningkatan sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak	Menjadikan masyarakat yang berdaya saing dilandasi iman dan taqwa serta berakhlak mulia	1. Meningkatnya kualitas sumber Daya manusia
2	Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok.	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat 2. Terjaganya kelestarian, nilai kejuangan, dan pengembangan budaya daerah
3	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
4	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan	1. meningkatnya perekonomian kabupaten 2. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
5	Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat 2. menguatkan konektivitas dari desa sampai kota, dan daeah perbatasan

Tabel 3.2
Misi dan Program Kepala Daerah Berdasarkan Permasalahan ,Faktor Penghambat
Dan Faktor Pendorong Bidang Kesehatan

NO	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15 -59 Tahun) Sesuai Standar Sehingga Masih Rendahnya Hasil Cakupan Kesehatan Pada Usia Produktif Target 216.604 Jiwa, Terlialisati Sebnyak 178.641 Jiwa Dengan.	1. Jumlah Posbindu 118 Dari 134 Desa/Kelurahan. 2. Belum semua desa/kelurahan memiliki kader terlatih.	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15 -59 Tahun) Sesuai Standar Sehingga Masih Rendahnya Hasil Cakupan Kesehatan Pada Usia Produktif Target 216.604 Jiwa, Terlialisati Sebnyak 178.641 Jiwa Dengan.
		2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Masih Rendah	1. Kurangnya kesadaran penderita hipertensi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan dan monitoring tekanan darah secara teratur 2. Adanya rasa takut penderita hipertensi untuk datang ke	1. Melakukan penyuluhan dan advokasi ke tokoh masyarakat 2. Fasilitas Kesehatan terakreditasi 3. Obat hipertensi tersedia 4. Tenaga terlatih 5. Posbindu 6. Meningkatkan fasilitas kesehatan mandiri (dokter praktek mandiri

			3. fasilitas kesehatan disebabkan wabah pandemi Covid-19	7. dan klinik)
		3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran penderita diabetes mellitus untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat 2. Adanya rasa takut penderita DM untuk datang ke fasilitas kesehatan disebabkan wabah pandemi Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyuluhan 2. Fasilitas Kesehatan terakreditasi 3. Obat diabetes mellitus tersediS 4. Tenaga terlatih 5. Posbindu
		4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa masih rendah 2. Masih ada stigma negative terhadap penderita jiwa 3. Belum terbentuknya DSSJ (desa siaga sehat jiwa) 4. Sumber daya pendukung layanan kesehatan jiwa masih terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan TIM pelaksanaan kesehatan jiwa (TP-KJM) dan membentuk DSSJ (desa siaga sehat jiwa) 2. Dukungan dana untuk ketersediaan obat jiwa 3. Ketersediaan psikiater 4. Adanya dukungan dana yang memadai untuk sosialisasi dan pembentukan DSSJ di masyarakat

		<p>5. Belum Tercapainya Penyelenggaraan Surveilans dengan mengintegrasikan dalam system surveilans di fasilitas kesehatan dan masyarakat</p>	<p>1. Adanya tugas rangkap dan mutase petugas yang telah terlatih</p>	<p>1. Dukungan Kegiatan dari Provinsi</p>
		<p>6. Masih adanya Desa yang tidak UCI sebanyak 31 Desa di Tahun 2021</p>	<p>1. Tidak adanya kegiatan sweeping dan beberapa bulan Posyandu di tutup karena Pandemi Covid-19 2. Kurangnya Kunjungan Masyarakat ke Posyandu dan Puskesmas disebabkan takut tertular Covid-19</p>	<p>1. Pelaksanaan sweeping 2. Meningkatkan SDM Kesehatan dan Kader Posyandu 3. Penulisan tentang Protokol Kesehatan tentang 3 M 4. Adanya Juknis pelaksanaan Imunisasi pada saat terjadinya Pandemi Covid-19</p>
		<p>7. Masih terdapat angka kematian Ibu dan Neonatal sehingga capaian Persalinan Nakes baru mencapai 85,63% capaian AKI 2021 yaitu :87,7/100.000 KLH dan angka kematian Neonatal (AKN) tahun 2021 yaitu 6,8/1000 KLH</p>	<p>1. Tingkat social budaya Masyarakat tentang pemanfaatan fasilitas kesehatan belum maksimal 2. Sarana dan Prasarana ditingkat Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama (FKTP) dan Tingkat Lanjut (FKTL) belum terpenuhi secara Lengkap</p>	<p>1. Penguatan pelaksanaan koordinasi dan integrase Lintas Program dan sector terkait 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Fasilitas Kesehatan</p>

<p>8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita (Usia 12-59 Bln) sesuai Target</p>	<p>1. Koordinasi dan Integrasi Lintas Program dan Sektor Belum maksimal</p>	<p>1. Penguatan Pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Lintas Program dan Sektor Terkait</p>
<p>9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dan Usia Lanjut Belum Sesuai Standart disebabkan Integrasi Program dan Koordiansi dengan Lintas Sektor Terkait belum Optimal</p>	<p>1. Kemauan dan Kesadaran untuk saling bersinergi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masih kurang 2. Adanya wabah Pandemi Covid-19 mengakibatkan Nakes Kesulitan Menjangkau Sasaran Anak Usia Pendidikan Dasar 3. Alokasi Dana yang kurang Mendukung</p>	<p>1. Penguatan Jalinan Koordinasi Lintas Program dan Integrasi Lintas Program dan Sektor Terkait 2. Pengalokasian dana yang Lebih Spesifik</p>
<p>10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut ≥60 Tahun belum sesuai Standart karena munculnya wabah Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan pelayanan pada lansia harus di Tunda untuk sementara karena Lansia masuk dalam Golongan Usia Rentan</p>	<p>1. Penguatan dan dukungan dari Sektor terkait masih kurang 2. Belum adanya Peraturan PEMDA/PERBUB Terkait Pelayanan Pada Lansia Resti</p>	<p>1. Adanya PERDA/PERBUB terkait peningkatan akses Pelayanan pada Lansia Kelompok Resti 2. Pengalokasian dana Layanan Lansia yang Lebih Spesifik</p>

<p>11. Sulitnya merubah Perilaku Masyarakat untuk Hidup sehat disebabkan oleh rendahnya Pengetahuan Masyarakat serta Mitos dan Strategi yang masih melekat di Masyarakat dari data capaian tahun 2021 rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat baru mencapai 32.359 rumah tangga dari 78.392 rumah tangga (59%)</p>	<p>1. Koordinasi Lintas Sektor dan Keterlibatan Pihak Swasta yang belum Optimal</p>	<p>1. Penggunaan APBDes untuk mendukung Pelaksanaan GERMAS dan Posyandu</p>
<p>12. Belum Semua Kecamatan yang menerapkan Kebijakan GERMAS dari data capaian tahun 2021 baru mencapai 50%</p>	<p>1. Koordinasi Lintas Sektor dan Keterlibatan Pihak Swasta yang belum Optimal</p>	<p>1. Penggunaan APBDes untuk mendukung Pelaksanaan GERMAS dan Posyandu</p>
<p>13. Percepatan penurunan Prevalensi stunting dan wasting belum tercapai</p>	<p>1. Faktor Ekonomi , Pengetahuan dan Pola Asuh yang Masih Kurang 2. Pelaksanaan Konferensi Penurunan Stunting dan Wasting Belum Optimal 3. Pola Konsumsi dan Sanitasi Lingkungan yang Tidak Sesuai</p>	<p>1. Adanya Komitmen Kepala Daerah Serta Lintas Sektor Terkait dalam penanganan Wasting dan Stunting</p>

<p>14. Pencapaian Kasus TB Paru belum maksimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM Laboratorium untuk Pemeriksaan Mikroskopis TB 2. Mutasi tenaga Terlatih ketempat Bidang Lain 3. Hasil Analisis Mikroskopis menunjukan Positive/Negative Palsu 4. Alat Mikroskopis kurang Memenuhi Standart atau bagian-bagian yang error 	<ol style="list-style-type: none"> 1. TCM di Fasyankes rujukan TCM di RSUD Daud Arif, Puskesmas Merlung dan Puskesmas Pijoan Baru. 2. Aplikasi SITB untuk mengurangi under reporting 3. Tersedia Logistik yang mencukupi
<p>15. Skrining Faktor Resiko dan Populasi Kunci Belum Optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Faktor resiko belum terdata dengan Optimal 2. Kasus hilang karena perpindahan pasien tanpa pemberitahuan 3. Diskriminasi pada kelompok ODHA yang masih tinggi. 4. Penjangkau Faktor resiko masih minim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Konseling testing dan PDP Kolaborasi dengan baik 2. Alat Pemeriksaan HIV tersedia dengan Baik dari DAK Provinsi 3. Aplikasi SIHA (Sistem Online HIV/AIDS untuk mengurangi under reportis.

<p>16. Belum terpenuhinya Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan di RS maupun di Puskesmas sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020 dan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Terpenuhinya SDM Kesehatan yang sesuai dengan kompetensi 2. Distribusi SDM Kesehatan yang tidak merata. 3. Belum tersedia anggaran pendidikan dokter lanjutan(Spesialis) pada pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian insentif daerah oleh pemerintah Daerah 2. Adanya kemauan SDM Kesehatan untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri 3. Adanya Program PGDS dari Pemerintah Pusat Kementerian Kesehatan 4. Adanya Program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan. 5. Adanya Program Pendidikan PPDGS/PPDS dari Kementerian Kesehatan 6. Adanya Program Dokter Internship Dokter Indonesia dari Kementerian Kesehatan. 7. Adanya dukungan dana dalam mendukung program Kementerian Kesehatan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		17. Masih Kurangnya Kompetensi SDM Kesehatan yang tersedia baik di RS maupun di Puskesmas	1. Terbatasnya anggaran diklat peningkatan kompetensi SDM Kesehatan	1. Adanya SOP Pelaksanaan Tugas di RS 2. Adanya Alokasi Dana untuk Diklat SDM Kesehatan
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2024 Dinas kesehatan memiliki tugas atau berada pada misi ke I (pertama) dan Misi 3(tiga) .

Untuk melaksanakan misi tersebut dinas Kesehatan sudah mempersiapkan program-program dan kegiatan dalam mencapai misi tersebut sebagai tolak ukur serta upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu

3.2.1 Tujuan dan sasaran.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD),maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Menjadikan masyarakat yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia.
2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif,

Adapun sasaran nya adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan.
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

Program dan kegiatan serta indicator yang telah ditetapkan tidak terlepas dari program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam renstra kementerian kesehatan dan renstra Dinas kesehatan provinsi sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Serta Faktor Penghambat Dan Pendorong

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan perangkat daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kesehatan ibu dan Anak dan Gizi Masyarakat	Masih terdapatnya Angka Kematian Ibu dan Neonatal (AKI dan AKN)	Tingkat social budaya masyarakat tentang pemanfaatan fasilitas kesehatan belum maksimal.	Penguatan Pelaksanaan Koordinasi dan integrasi lintas program dan sector terkait
		Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting dan Wastings	Faktor Ekonomi ,Pengetahuan dan Pola Asuh yang Masih Kurang, Pelaksanaan Konfergensi Penurunan Stunting dan Wasting Belum Optimal serta Pola Konsumsi dan Sanitasi Lingkungan yang Tidak Sesuai	Adanya Komitmen Kepala Daerah Serta Lintas Sektor Terkait dalam penanganan Wasting dan Stunting

		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir , kesehatan balita (usia 12-59 bln) Sesuai Standar belum mencapai target	Koordinasi dan Integrasi Lintas Program dan sector belum maksimal	Penguatan pelaksanaan koordinasi dan integrase lintas program dan sector terkait
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Minimnya Jumlah SDM Kesehatan khususnya medis Spesialis di RS sesuai dengan PMKes nomor 3 tahun 2020 dan Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar belum optimal.	Sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas, belum tersedianya anggaran Pendidikan dokter lanjutan (spesialis) pada pemerintah.	Pemberian insentif daerah oleh pemerintah Daerah, Adanya kemauan SDM Kesehatan untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri dan Adanya Program PGDS dari Pemerintah Pusat
		Kurang Mumpuninya Kualitas SDM yang tersedia	Terbatasnya anggaran diklat peningkatan kualitas SDM	Adanya SOP Pelaksanaan Tugas di RS
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Adanya Wabah Pandemi Covid-19 mengakibatkan Nakes kesulitan menjangkau sasaran anak usia Pendidikan dasar, Alokasi dana yang kurang mendukung	Penguatan Jalinan Koordinasi Lintas Program dan Sektor terkait

		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Atau Lebih) Sesuai Standar	Adanya Wabah Pandemi Covid-19 mengakibatkan Nakes kesulitan menjangkau sasaran anak usia Pendidikan dasar, Alokasi dana yang kurang mendukung dan belum adaya Peraturan PEMDA/PERBUP terkait pelayanan pada Lansia Resti.	Dibentuknya PERDA/PERBUP terkait peningkatan akses pelayanan pada lansia kelompok Resti.
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.	Belum tercapainya penyelenggaraan surveilain dengan mengintegrasikan dalam system surveilains di fasilitas kesehatan dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Tugas Rangkap dan Mutasi Petugas yang Telah Terlatih 2. Adanya petugas yang belum memahami Surveilains Covid-19 	Penguatan Pelaksanaan Koordinasi dan integrasi lintas program dan sector terkait
		Masih adanya desa yang tidak UCI Sebanyak 18 desa(Cakupan Imunisasi Lengkap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kegiatan sweeping dan beberapa bulan Posyandu di tutup karena Pandemi Covid-19 2. Kurangnya Kunjungan Masyarakat ke Posyandu dan Puskesmas disebabkan takut tertular Covid-19 	Penguatan Pelaksanaan Koordinasi dan integrasi lintas program dan sector terkait

		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Posbindu 118 dari 134 Desa/Kelurahab belum memiliki kader terlatih. 2. Posbindu KIT Tersedia sebanyak 114 KIT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dana dalam
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran penderita Hipertensi ke Fasilitas Kesehatan terdekat untuk melakukan Pemeriksaan dan Monitoring tekanan darah secara teratur 2. Adanya rasa takut Penderita Hipertensi untuk datang ke Fasilitas Kesehatan disebabkan wabah Pandemi Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyuluhan dan advokasi ke tokoh masyarakat 2. Fasilitas Kesehatan terakreditasi 3. Obat hipertensi tersedia 4. Tenaga Kesehatan terlatih 5. Posbindu 6. Meningkatkan fasilitas kesehatan mandiri (dokter praktek mandiri dan klinik)
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dm) Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Kurangnya Kesadaran Penderita Diabetes Melitus untuk berobat ke Fasilitas Kesehatan Terdekat. 2. Adanya rasa takut penderita DM untuk datang ke Fasilitas Kesehatan disebabkan wabah Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyuluhan 2. Fasilitas Kesehatan terakreditasi 3. Obat diabetes mellitus tersedia 4. Tenaga terlatih 5. Posbindu 6. Tersedianya FKTP diwilayah.

		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa masih rendah 2. Masih ada Stigma Negative 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan TIM pelaksanaan kesehatan jiwa (TP-KJM) dan membentuk DSSJ (desa siaga sehat jiwa) 2. Dukungan dana untuk ketersediaan obat jiwa 3. ketersediaan psikiater 4. Dukungan dana yang memadai untuk sosialisasi dan pembentukan DSSJ di masyarakat
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM Laboratorium untuk Pemeriksaan Mikroskopis TB 2. Mutasi Tenaga Terlatih ketempat Bidang Lain 3. Hasil Analisis Mikroskopis menunjukkan Positive/Negative 4. Alat Mikroskopis kurang memenuhi standart atau bagian-bagian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. TCM di Fasyankes rujukan TCM di RSUD Daud Arif, Puskesmas Merlung dan Puskesmas Pijoan Baru. 2. Aplikasi SITB untuk mengurangi under reporting 3. Tersedia Logistik yang mencukupi
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Hiv Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Fakor resiko belum terdata dengan optimal 2. Kasus Hilang karena perpindahan pasien tanpa pemberitahuan 3. Diskriminasi pada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim yang solid difasilitas pelayanan Kesehatan 2. Dana Mobile VCT Tersedia 3. Melakukan Penyuluhan

			<p>Kelompok ODHA masih Tinggi</p> <p>4. Penjangkau Faktor Resiko</p> <p>5.</p>	
4	<p>Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah</p>	<p>1. Kebutuhan obat di fasilitas pelayanan kesehatan sangat bervariasi (khususnya selain kebutuhan obat standar faskes tingkat I)</p> <p>2. Meningkatnya kebutuhan perbekalan kesehatan khususnya bahan medis habis pakai (BMHP) yang tidak selaras dengan ketersediaan dana</p>	<p>1. Terbatasnya dana untuk penyediaan obat, vaksin dan perbekalan Kesehatan</p> <p>2. Fluktuatifnya harga obat</p> <p>3. Tidak semua obat, vaksin dan perbekalan kesehatan ada di E-catalog</p> <p>- Harga obat, vaksin dan BMHP yang tidak ada di E-Catalog cenderung lebih tinggi.</p>	<p>1. Harga E-catalog memudahkan dalam penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau</p> <p>2. Fasilitas pelayanan kesehatan bisa menyediakan sendiri sejumlah kecil kebutuhan obat melalui dana BLUD</p>
5	<p>Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar</p>	<p>Masih Kurangnya Kompetensi SDM Kesehatan yang tersedia baik di RS maupun di Puskesmas</p>	<p>Terbatasnya anggaran diklat peningkatan kompetensi SDM Kesehatan</p>	<p>1. Adanya SOP Pelaksanaan Tugas di RS</p> <p>2. Adanya Alokasi Dana untuk Diklat SDM Kesehatan</p>

6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Jaminan Kesehatan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Masyarakat miskin belum valid 2. Pendanaan belum memadai 3. Data PBI belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Masyarakat Miskin Valid 2. Koordinasi Lintas Program sectoral dengan dinsos, dukcapil. 3. Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan
---	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra Dinkes provinsi serta faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinkes Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat	Masih terdapat Kondisi Letak Geografis Daerah yang sulit dijangkau Masyarakat	Keterbatasan Anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan	Komitmen kepala daerah dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana
2	Meningkatnya sediaan farmasi yang bermanfaat dan aman	Masih terbatasnya sediaan obat tertentu di sarana pelayanan kesehatan	Keterbatasan Anggaran untuk pemenuhan ketersediaan Obat-obat Tertentu	Komitmen Kepala Daerah dalam Upaya Penyediaan Obat-Obat Tertentu
3	Meningkatnya pembiayaan kesehatan	Masih adanya masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	Pendataan Masyarakat Miskin yang belum optimal.	Komitmen Kepala Daerah serta Lintas Sektor Terkait
4	Terwujudnya sumber daya kesehatan proporsional dan profesional	Belum semua Puskesmas yang memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan	Penempatan SDM Kesehatan yang belum Merata	Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Kesehatan.
5	Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	Masih rendahnya capaian pelayanan penyakit tidak menular sesuai standart	Kurangnya kesadaran Penderita Penyakit tidak menular untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat dan rasa takut untuk datang ke fasilitas	Fasilitas Kesehatan terakreditasi, ketersediaan obat PTM DI Fasilitas Kesehatan, Tenaga terlatih, ketersediaan Posbindu.

			kesehatan disebabkan wabah pandemi Covid-19	
6	Menurunnya angka kesakitan penyakit menular	Belum Optimalnya capaian Pelayanan Penyakit Menular	Kurangnya SDM Laboratorium untuk Pemeriksaan, Mutasi tenaga Terlatih ketempat Bidang Lain , Alat Mikroskopis kurang Memenuhi Standart atau bagian-bagian yang error	Ketersediaan Alat Pemeriksaan Laboratorium yang memenuhi standart untuk Pemeriksaan dan Tersedia Logistik yang mencukupi
7	Meningkatnya penanggulangan masalah gizi	Kualitas dan kuantitas pelayananan Kesehatan Gizi Masyarakat belum memadai.	Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum optimal dan Sulitnya melaksanakan perubahan perilaku dimasyarakat karena banyaknya mitos dan tradisi yang melekat.	Komitmen Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam penanganan Stunting
8	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Sulitnya merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat serta mitos dan strategis yang masih melekat di masyarakat serta belum semua kecamatan yang menerapkan kebijakan GERMAS .	Koordinasi Lintas Sektor dan Keterlibatan Pihak Swasta yang belum Optimal	Penggunaan APBDes untuk mendukung pelaksanaan GERMAS.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan Hidup strategis (KLHS).

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 2 Rumah Sakit dan 16 Puskesmas. Untuk meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan merencanakan beberapa pembangunan fasilitas pelayanan dan peningkatan status fasilitas pelayanan antara lain peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas rawat inap, berikut adalah tabel rencana pembangunandan tata ruang fasilitas pelayanan kesehatan 2021-2026.

Tabel 3.5

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN BERDASARKAN TELAHAH RENCANA TATA RUANG(RTRW) WILAYAH
SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Rencana tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Puskesmas Pembantu.	Kondisi Geografis Yang Menyebabkan Jangkauan Untuk	Ketersediaan Sarana Penunjang dan SDM Kesehatan Belum Sesuai	Adanya dukungan dana pembangunan dari dana Alokasi khusus Bidang Kesehatan
2	Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Rawat Inap	Mendapat Akses Pelayanan Msh Terkendal	Permenkes 43 Tahun 2019	Adanya dukungan dana pembangunan dari dana Alokasi khusus Bidang Kesehatan
3	Pembangunan IPAL Puskesmas	Ketersediaan Sarana Pembuangan Limbah Cair Puskesmas	Belum Tersedianya Pembuangan Limbah Cair Di Puskesmas	
4.	Pembangunan Penambahan Gedung dan Akses Jalan Lingkungan Rumah Sakit	Terbatasnya Gedung Rawat Inap dan Akses Jalan Lingkungan Rumah Sakit	Tidak Tersedianya Lahan untuk Pembangunan .	Adanya Komitmen Pemerintah Daerah dan Dukungan dari Dana yang Lainnya

Tabel 3.6

Telaah Rencana Struktur Tata Ruangan Dinas Kesehatan Kabupaten tanjung jabung Barat

NO	Rencana Struktur Ruang	Struktur ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan ruang pada priode perencanaan tahun berkenaan	Pengaruh rencana struktur ruang pada Pelayanan Perangkat Daerah	Arah lokasi Pengembangan Pelayanan
A	PEMBANGUNAN PUSTU				
1	Pustu desa Bram Itam kanan. (Pusk.Sei.saren)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
2	Pustu di desa jati Emas (Pusk.sei Saren)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
3	Pustu di parit Tarmum (Puskes.Sukarejo)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
4	Pustu Blok A desa Purwodadi(Pusk.Purwodadi)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
5	Pustu di desa sungai Paur Rt 12 (Pusk. Lubuk kambing)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis

6	Pembangunan Pustu di mekarjati Pusk.Teluk nilai)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
7	Pembangunan Pustu di Prt.Bilal (Pusk.Teluk Nilau)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
8	Pembangunan Pustu di sei.pampang (Pusk.Tlk Nilau)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
9	Pembangunan Pustu di PRT.sidang (Pusk.Tlk.Nilau)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
10	Pembangunan Pustu di karya maju Pusk.(Tlk Nilau)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
11	Pustu di desa Dataran Pinang (Prt.Deli)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
12	Pustu di desa Rawa medang Pusk.Suban)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
13	Pustu di desa RAWANG kempas Pusk.rawa Medang)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
14	Pustu di desa Sungai Badar (Pusk.rawa Medang)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis

15	Pustu di desa Lubuk Lawas (Pusk.Suban	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
16	Pustu di desa Suban (Pusk.Suban	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
17	Pustu di desa Tanjung bojo (Pusk.Suban	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
18	Pustu di desa Talang makmur (Pusk.Pijoan	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
19	Pustu Desa sungai papauh Bkt Indah)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
20	Desa Pematang balam (bkt.Indah)	belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
21	Desa Harapan jaya Pusk. Tkl V)	Belum ada	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan	Lokasi pembangunan strategis
B	PENINGKATAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP MENJADI RAWAT INAP	saat ini baru 7 puskesmas yang rawat inap	mendekatkan akses Pelayanan rujukan	Puskesmas melaksanakan Pelayanan perawatan rawat inap	Lokasi Peningkatan yang sangat strategis
1	Puskesmas Parit Deli	Puskesmas non rawat Inap	mendekatkan akses Pelayanan rujukan	Puskesmas melaksanakan Pelayanan perawatan rawat inap	Lokasi Peningkatan yang sangat strategis

2	Puskesmas Senyerang	Puskesmas non rawat Inap	mendekatkan akses Pelayanan rujukan	Puskesmas melaksanakan Pelayanan perawatan rawat inap	Lokasi Peningkatan yang sangat strategis
C	PEMBANGUNAN IPAL PUSKESMAS	Baru 6 Puskesmas yang ada saat ini	limbah cair Puskesmas terkendali	tidak terjadi pencemaran lingkungan sehingga kebersihan lingkungan terjaga	Setiap Puskesmas
a	Pembangunan IPAL Puskesmas Pelabuhan dagang	belum ada	limbah cair Puskesmas terkendali	Tidak terjadi pencemaran lingkungan	setiap Puskesmas harus ada
b	Pembangunan IPAL Puskesmas Lubuk kambing	belum ada	limbah cair Puskesmas terkendali	Tidak terjadi pencemaran lingkungan	setiap Puskesmas harus ada
c	Pembangunan IPAL Puskesmas Bukit Indah	belum ada	limbah cair Puskesmas terkendali	Tidak terjadi pencemaran lingkungan	setiap Puskesmas harus ada
d	Pembangunan IPAL Puskesmas Pijoan Baru	belum ada	limbah cair Puskesmas terkendali	Tidak terjadi pencemaran lingkungan	setiap Puskesmas harus ada
e	Pembangunan IPAL Puskesmas Purwodadi	belum ada	limbah cair Puskesmas terkendali	Tidak terjadi pencemaran lingkungan	setiap Puskesmas harus ada
f	Pembangunan IPAL Puskesmas Senyerang	belum ada	limbah cair Puskesmas terkendali	Tidak terjadi pencemaran lingkungan	setiap Puskesmas harus ada
g	Pembangunan IPAL Puskesmas Parit Deli	belum ada	limbah cair Puskesmas terkendali	Tidak terjadi pencemaran lingkungan	setiap Puskesmas harus ada

h	Pembangunan IPAL Puskesmas Tungkal V	belum ada	limbah cair Puskesmas terkendali	Tidak terjadi pencemaran lingkungan	setiap Puskesmas harus ada
i	Pembangunan IPAL Puskesmas sei.saren	belum ada	limbah cair Puskesmas terkendali	Tidak terjadi pencemaran lingkungan	setiap Puskesmas harus ada
j	Pembangunan IPAL Puskesmas rantau badak	belum ada	limbah cair Puskesmas terkendali	Tidak terjadi pencemaran lingkungan	setiap Puskesmas harus ada
D	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	Struktur ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan ruang pada priode perencanaan tahun berkenaan	Pengaruh rencana struktur ruang pada Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan
1	Pembangunan Gedung Isolasi Rumah Sakit Daud Arif	Belum Ada	Peningkatan Kualitas dan mutu pelayanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD KH.Daud Arif
2	Pengembangan Gedung Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Daud Arif	Rawat inap kelas III saat ini bergabung pada setiap unit sesuai penyakit	Peningkatan Kualitas dan mutu pelayanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD KH.Daud Arif
3	Perluasan Lahan pengembangan Rumah Sakit Daud Arif	Tidak tersedia lagi lahan kosong untuk pengembangan di area tanah milik Rumah sakit	Peningkatan Kualitas dan mutu pelayanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD KH.Daud Arif

4	Peningkatan Akses jalan lingkungan Rumah Sakit Daud Arif	Tidak tersedia lahan untuk jalan lingkungan RS	Peningkatan Kualitas dan mutu pelayanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD KH.Daud Arif
5	Pembangunan Gedung Haemodialisa Rumah Sakit Daud Arif	Belum Ada	Peningkatan Kualitas dan mutu pelayanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD KH.Daud Arif
6	Pembangunan Rumah Dinas Direktur	Belum Ada	Peningkatan Kualitas dan mutu pelayanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD Suryah Khairuddin
7	Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis	Belum Ada	Peningkatan Kualitas dan mutu pelayanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD Suryah Khairuddin
8	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Belum Ada	Peningkatan Kualitas dan mutu pelayanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD Suryah Khairuddin

3.4.2 Analisis kajian Lingkungan hidup strategis (KLHS).

Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan dengan menggunakan peralatan medis dan bahan medis pasti akan menimbulkan dampak tersendiri bagi lingkungan di sekitar sarana tersebut, adapun dampak yang di timbulkan tidak langsung dirasakan oleh warga atau masyarakat sekitarnya, namun setelah beberapa tahun kemudian dampak limbah medis ini dapat di minimalisir bahkan di netralkan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan oleh kementerian kesehatan dan kementerian lingkungan hidup sebagai alat pengolahan limbah medis puskesmas atau di sebut IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah Air Limbah). Melihat dari dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung jabung Barat berupaya untuk terus melengkapi sarana dan prasarana pelayanan Puskesmas salah satunya adalah Alat pengolahan limbah di setiap puskesmas . Berikut aspek kajian yang berhubungan dengan pembangunan sarana kesehatan.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan

No	Hasil KHLS terkait Tugas dan fungsi Perangkat daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pembangunan IPAL Puskesmas	belum tersedianya sarana pengolahan limbah medis di semua puskesmas	keterbatasan dana untuk pembangunan instalasi	Adanya peluang dari pemerintah pusat/kementerian kesehatan untuk pembangunan sarana IPAL

Tabel 3.8

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Tanjung jabung barat Dinas Kesehatan kabupaten tanjung jabung barat

NO	Aspek kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan perangkat Daerah	Catatan bagi perumusan program dan kegiatan Perangkat daerah
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Penyelamatan Air tanah dan Lingkungan Akibat Limbah medis Puskesmas	Air Tanah dapat digunakan sebagai air bersih di Puskesmas	Permenkes No 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Mengurangi resiko pencemaran lingkungan akibat dari limbah medis puskesmas terutama puskesmas perawatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan mengurangi tingkat risiko pencemaran akibat limbah medis di lingkungan sekitar puskesmas	Program pengendalian limbah ini wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup no. 56 th 2015.

3	Kinerja layanan jasa ekosistem	Pembangunan Fasilitas Kesehatan tidak mengganggu Ekosistem .	Tidak menimbulkan penyakit yang berbasis Lingkungan	UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Kesesuaian Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Kondisi Alam .	Tidak terjadi kerusakan pada Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
5	Tingkat kerentanan sumber daya alam	Pembangunan Fasilitas Kesehatan tidak mengganggu sumber daya alam yang ada.	Tidak menimbulkan dampak lingkungan pada Sumber Daya Alam di tempat Fasilitas Kesehatan yang di bangun.	Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

6	Tingkat Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Mempertahankan Keanekaragaman hayati yang di lindungi.	Pembangunan Saranan Fasilitas Kesehatan tidak merusak keanekaragaman Hayati	UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
---	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi Kesehatan Jangka Menengah 2020 – 2024 yakni Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dalam penjabaran Pembangunan Nasional dalam RPJPN 2005 – 2025 dalam Visi dan Misi Presiden disederhanakan dengan 9 (Sembilan) agenda Prioritas yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024).

Dan untuk mewujudkan Visi Presiden tersebut maka melalui Misi yang dikenal sebagai Nawacita ,yang mana upaya membangun kesehatan masyarakat Kesehatan masuk dalam nawacita ke 5 yaitu. Dengan semangat Nawacita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Kemenkes hadir dari pinggir ke tengah melalui program Indonesia Sehat.untuk mendukung mewujudkan Pembangunan manusia ,sector unggulan, pemerataan dan kewilayahan dimana bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan Perencanaan Pembangunan Nasional, dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.Sesuai dengan Nawacita Kelima Visi pembangunan Kesehatan Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” telah sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang Kesehatan diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan terutama untuk

meningkatkan derajat Kesehatan. Dalam menjalankan tugas pokok fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menghadapi permasalahan antara lain :

- 1) Kurang nya SDM Medis khususnya dokter spesialis di Rumah sakit
- 2) Masih kurang nya gedung pelayanan kesehatan rawat inap dan instalasi penunjang di rumah sakit.
- 3) Masih adanya bangunan Puskesmas yang belum sesuai dengan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 75.
- 5) Manajemen Perencanaan Puskesmas belum berbasis ASPAK Dalam pemenuhan sarana prasarana,sumber daya kesehatan serta obat-obatan, vaksin serta BMHP untuk pelayanan Puskesmas Pemahaman petugas tentang ASPAK masih kurang.
- 6) Perencanaan Alat di Puskesmas belum berdasarkan ASPAK
- 7) Pemahaman petugas tentang kalibrasi masih kurang sehingga Masih banyak alat yang belum dikalibrasi
- 8) Masih ditemukan petugas Puskesmas yang belum memahami dan memiliki kemampuan kesehatan yang diberikan belum sesuai standar.
- 9) Distribusi SDM kesehatan sesuai kopetensi ke puskesmas belum Merata
- 10) Belum terpenuhinya 9 jenis SDM Kesehatan disetiap Puskesmas
- 11) Capaian Persalinan Nakes tahun 2021 baru mencapai 85,63%, capaian AKI 2021 baru 87,7/100.000 KLH,capaian AKN 2021 6,8/1000 KLH.
- 12) Dalam penurunan stunting dan wasting kualitas dan kuantitas belum memadai ,koordinasi lintas sector dan lintas program belum optimal ,sulitnya melaksanakan perubahan perilaku di masyarakat karena banyaknya mitos dan tradisi yang melekat
- 13) Belum adanya kecamatan yang menerapkan kebijakan germas dan pada saat ini tahun 2021 jumlah posyandu aktif baru mencapai 54,9% serta masih kurang nya penguatan sanitasi total berbasis masyarakat
- 14) Pencapaian Desa ODF tahun 2021 baru mencapai 18,66% sementara targetnya adalah 60%, disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sehingga terhindar dari factor resiko penyakit menular dan tidak menular

- 15) Pada program imunisasi untuk capaian desa uci masih ada 31 desa lagi yang belum dari 134 desa /kelurahan.
- 16) Masih adanya masyarakat miskin tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
- 17) Penguatan koordinasi dan integrasi lintas sector belum maksimal pada pelayanan kesehatan ibu hamil,ibu bersalin,bayi baru lahir,balita usia 12-59 bulan.
- 18) Rendahnya cakupan pelayanan pada anak usia pendidikan karena sulitnya jangkauan akibat dari pandemic covid-19 yang diharuskan belajar during.
- 19) Cakupan pelayanan pada usia produktif masih rendah yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan terutama penyakit tidak menular seperti Hypertensi, DM dan Kanker leher rahim dan ODGJ
- 20) Masih rendahnya cakupan pelayanan usia lanjut hal ini disebabkan adanya wabah Covid-19 yang membuat kegiatan program lansia harus ditunda.
- 21) Masih kurangnya cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis disebabkan kurangnya tenaga laboratorium mikroskopis dan kepatuhan minum obat yang masih kurang. Serta adanya diagnose yang positif/negative palsu.
- 22) Kurangnya cakupan Pelayanan kesehatan dengan Risiko terinfeksi virus HIV disebabkan belum terdatanya kelompok populasi kunci factor risiko,missing case dan pengobatan yang tidak tepat waktu dan kurangnya kerjasama program pada skrinning triple eliminasi

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi *Isu-Isu Strategis* antara lain :

1. Mutu Pelayanan kesehatan yang sesuai standar'
2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB)
3. Pencegahan dan Percepatan penurunan prevalensi Stanting dan wasting
4. Pembudayaan Prilaku Hidup Sehat melalui Germas
5. Penyelenggaraan penemuan Faktor risiko dan surveilans penyakit dengan mengintegrasikan dalam system pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di fasilitas kesehatan serta

penguatan healthy security (keamanan Kesehatan) untuk penanganan Pandemi

6. Cakupan imunisasi lengkap
7. Jaminan Kesehatan Nasional

Tabel 3.9

SKOR Penentuan BOBOT dari Kriteria ISU-ISU Strategis

No	Kriteria *)	Bobot**)
1	Memiliki Pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L atau renstra provinsi	20
2	Merupakan Tugas dan Tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang di timbulkan nya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu di wujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.10
SKOR KRITERIA PENENTUAN ISI_ISU STRATEGIS

No	Isu-isu strategis	Total skor	Rata-rata skor
1	Mutu Pelayanan kesehatan yang sesuai standar	100	14,2
2	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB).	100	14,2
3	Pencegahan dan Percepatan penurunan prevalensi Stunting dan wasting.	100	14,2
4	Pembudayaan Prilaku Hidup Sehat melalui Germas.	70	10
5	Menyelenggarakan penemuan Faktor risiko dan surveilans penyakit dengan mengintegrasikan dalam system pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di fasilitas kesehatan serta penguatan healty security (keamanan Kesehatan) untuk penanganan Pandemi	45	6,4
6	Cakupan imunisasi lengkap	35	5
7	Jaminan Kesehatan Nasional	80	11,4

Tabel 3.11
NILAI SKALA KRITERIA

No	Isu Strategis	Nilai Skala kriteria ke-						Total skor
1	Mutu Pelayanan kesehatan yang sesuai standar'	20	10	20	10	15	25	100
2	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB).	20	10	20	10	15	25	100
3	Pencegahan dan Percepatan penurunan prevalensi Stanting dan wasting.	20	10	20	10	15	25	100
4	Pembudayaan Prilaku Hidup Sehat melalui Germas.			20	10	15	25	70
5	Menyelenggaraan penemuan Faktor risiko dan surveilans penyakit dengan mengintegrasikan dalam system pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di fasilitas kesehatan serta penguatan healty security (keamanan Kesehatan) untuk penanganan Pandemi		10	20		15		45
6	Cakupan imunisasi lengkap			20		15		35
7	Jaminan Kesehatan Nasional		10	20	10	15	25	80

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah:

4.1 Tujuan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan ***meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.***

4.2 Sasaran

Dinas Kesehatan kabupaten tanjung jabung barat menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan yang bermutu
 - Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan
 - Presentase Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil
 - Angka harapan Hidup
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan keluarga
 - Angka Kematian ibu
 - Angka Kematian Neonatal
3. Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat
 - Prevalensi Stunting
4. Menurunnya Prevalensi Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Success rate TBC
 - Persentase Desa/Kelurahan UCI
 - Persentase Penemuan Kasus HIV/AIDS yang di obati
 - Prevalensi Hipertensi
 - Prevalensi Diabetes Melitus (DM)
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja Perangkat Daerah
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - Nilai AKIP

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan yang bermutu	Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan	75%	77%	79%	80%	82%	85%
			Persentase Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil	17.85%	12.5%	25%	37%	50%	62.5%
			Angka harapan Hidup	68,12	68,21	68,30	68,40	68,49	68,58
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga	Angka Kematian Ibu	217/ 100.000 KLH	205/ 100.000 KLH	194/ 100.000 KLH	183/ 100.000 KLH	180/ 100.000 KLH	178/ 100.000 KLH
			Angka Kematian Neonatal	12,2/1000 KLH	11,6/ 1000 KLH	11/ 1000 KLH	10/1000 KLH	9/1000 KLH	8/1000 KLH
3		Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat	Prevalensi Stunting	20 %	18%	17%	16%	15%	14%
4		Menurunnya Prevalensi Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Success rate TBC	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa/Kelurahan UCI	90 %	93%	95%	95%	95%	95%
			Persentase Penemuan Kasus HIV/AIDS yang di obati	54%	60%	60%	61%	62%	64%
			Prevalensi Hipertensi	32.20%	32.2%	31,5%	31%	30,5%	30%
			Prevalensi Diabetes Melitus (DM)	2.00%	1.60%	1.55%	1.52%	1.50%	1.50%
5		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,28 %	82,5 %	83%	83,5 %	84%	84,5 %
			Nilai AKIP	60.05	62.25	65%	66%	68%	70 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang ditetapkan terdiri atas:

1. Penyediaan sarana, prasarana Pelayanan Kesehatan ,alat Kesehatan, serta Obat-obatan dan SDM Kesehatan yang berkompeten dan merata.
2. Peningkatan kesehatan ibu ,anak, kesehatan reproduksi dan Perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Promosi PHBS dan menggerakkan masyarakat akan kebutuhan sanitasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui koordinasi dan komunikasi serta edukasi dalam penggerakan masyarakat.
4. Peningkatan sosialisasi dan advokasi kebijakan terhadap program kesehatan Penyakit Menular & Tidak Menular .
5. Peningkatan sosialisasi dan advokasi kebijakan terhadap program kesehatan Penyakit Menular & Tidak Menular .
6. Penguatan jejaring petugas surveilans dalam penemuan kasus potensial wabah dan bencana serta deteksi dini kasus KIPI dan Akselerasi capaian Desa UCI.
7. Koordinasi dan Advokasi dengan lintas sector dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
8. Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan Prima

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan terdiri atas:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar (Permenkes 43)
2. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Permenkes No 30 Tahun 2014)
3. Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi menggunakan pendekatan siklus hidup mulai dari ibu hamil , bayi ,anak , balita ,anak usia sekolah secara continue .
4. (Rencana Aksi Program Kesehatan Masyarakat 2020-2024)
5. Pembudayaan PHBS melalui gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat serta Melakukan kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) dan dukungan lintas sektor
6. Peningkatan Kapasitas SDM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
7. Pemenuhan Sarana prasarana pendukung
8. Pembangunan system kewaspadaan dini dan respon krisis kesehatan serta mengembangkan dan akselerasi kapasitas sumber daya jejaring petugas surveilans.
9. Peningkatan Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat untuk mendapat Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran , laporan, evaluasi dan capaian kinerja

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis

MISI I : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penyediaan sarana, prasarana Pelayanan Kesehatan ,alat Kesehatan, serta Obat-obatan dan SDM Kesehatan yang berkompeten dan merata.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar (Permenkes 43) Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Permenkes No 30 Tahun 2014)
		Koordinasi dan Advokasi dengan lintas sector dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional	Peningkatan Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat untuk mendapat Jaminan Kesehatan Nasional
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kesehatan ibu ,anak, kesehatan reproduksi dan Perbaikan Gizi Masyarakat.	Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi menggunakan pendekatan siklus hidup mulai dari ibu hamil , bayi ,anak , balita ,anak usia sekolah secara continue
	Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat		
	Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan sosialisasi dan advokasi kebijakan terhadap program kesehatan Penyakit Menular & Tidak Menular .	1. Peningkatan Kapasitas SDM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 2. Pemenuhan Sarana prasarana pendukung 3. Pembangunan system kewaspadaan dini dan respon krisis kesehatan serta mengembangkan dan akselerasi kapasitas sumber daya jejaring petugas surveilans.
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja Perangkat daerah	Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan Prima	Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran , laporan, evaluasi dan capaian kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah Perumusan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan nilai-nilai dalam pelayanan kesehatan, maka dilakukan penetapan program, yang akan dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan dan proyek.

Dalam penetapan Program Prioritas dalam Renstra 2021- 2026 ini, dinas Kesehatan merujuk pada Program - Program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan minuman.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	KO				PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN	TARGET		TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	KONDISI					
									TAHUN 2021	Target										Rp	Target	Rp	Target
(1)	(2)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja keuangan	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor (Dinas Kesehatan)	100%	100%	133,315,502,973	100%	188,198,158,935	100%	126,716,985,421	100%	134,822,215,024	100%	129,048,947,027	100%	130,080,197,027	100%	912,217,316,524	
		1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	192,829,770	100%	471,000,000	100%	304,800,000	100%	318,000,000	100%	318,000,000	100%	318,000,000	100%	2,082,050,000	
		1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	5 Dokumen	5 Dokumen	54,699,770	5 Dokumen	185,000,000	5 Dokumen	83,500,000	5 Dokumen	93,500,000	5 Dokumen	93,500,000	5 Dokumen	93,500,000	5 Dokumen	549,000,000
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Daud Arif)			20,000,000	4 Dokumen	23,000,000	4 Dokumen	36,300,000	4 Dokumen	23,000,000	4 Dokumen	23,000,000	4 Dokumen	23,000,000	4 Dokumen	128,300,000	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RS Suryah Khairudin)			20,000,000	100%	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	100,000,000	
		1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dinas Kesehatan)	50 Orang	4 Dokumen	98,130,000	5 Dokumen	5 Dokumen	49,500,000	5 Dokumen	54,450,000	5 Dokumen	54,450,000	5 Dokumen	54,450,000	5 Dokumen	212,850,000	
		1	02	01		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kesehatan)				12 Laporan	168,000,000	12 Laporan	115,500,000	12 Laporan	127,050,000	4 Laporan	127,050,000	4 Laporan	127,050,000	4 Laporan	664,650,000
		1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)				4 Laporan	75,000,000	4 Laporan	80,000,000	4 Laporan	90,750,000	4 Laporan	90,750,000	4 Laporan	90,750,000	4 Laporan	427,250,000
		1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	100%	79,139,107,078	100%	109,296,820,105	100%	98,856,468,464	100%	106,427,685,611	100%	100,508,451,096	100%	101,327,951,096	100%	516,585,226,372
		1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	16 Puk dan 2 RSUD, 1 IFK dan Dinkes	16 Puk dan 2 RSUD, 1 IFK dan Dinkes	67,748,926,077	612 Orang / Bulan	82,000,000,000	612 Orang / Bulan	67,748,926,077	612 Orang / Bulan	74,523,818,685	612 Orang / Bulan	67,748,926,077	612 Orang / Bulan	67,748,926,077	612 Orang / Bulan	359,770,596,916
							Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD Daud Arif)			7,143,021,254	192Orang/Bulan	19,565,945,508	192Orang/Bulan	22,801,277,000	192Orang/Bulan	22,801,277,000	192Orang/Bulan	22,801,277,000	192Orang/Bulan	22,801,277,000	192Orang/Bulan	110,771,053,508	

						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan)	100%	100%	2,040,781,354	100%	5,165,913,759	100%	3,356,854,457	100%	3,422,427,526	100%	3,277,214,044	100%	3,488,964,044	100%	19,201,648,114	
		1	02	01	2.06																		
		1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	12 Bulan	12 Bulan	43,547,886	18 Paket	165,200,000	18 Paket	54,516,000	18 Paket	59,967,600	18 Paket	59,967,600	18 Paket	59,967,600	18 Paket	443,166,686
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (RSUD KH Daud Arif)			58,063,848	1 Paket	66,080,000	1 Paket	199,892,000	1 Paket	199,892,000	1 Paket	199,892,000	1 Paket	199,892,000	1 Paket	199,892,000
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (RS Suryah Khairudin)			43,547,886	1 Paket	30,999,936	1 Paket	45,890,000	1 Paket	52,773,500	1 Paket	52,773,500	1 Paket	52,773,500	1 Paket	52,773,500
		1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	12 Bulan	12 Bulan	49,924,781	18 Paket	205,000,000	18 Paket	67,650,000	18 Paket	74,415,000	18 Paket	74,415,000	18 Paket	74,415,000	18 Paket	545,819,781
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (RSUD Daud Arif)			66,566,375	1 Paket	747,007,547	1 Paket	248,050,000	1 Paket	248,050,000	1 Paket	248,050,000	1 Paket	248,050,000	1 Paket	1,805,773,922
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (RS Suryah Khairudin)			49,924,781	2 Paket	146,152,946	2 Paket	73,076,473	2 Paket	84,037,944	2 Paket	84,037,944	2 Paket	84,037,944	2 Paket	521,268,032
		1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dinas Kesehatan)				1 Paket	175,000,000	1 Paket	61,000,000	1 Paket	67,100,000	1 Paket	175,000,000	1 Paket	175,000,000	1 Paket	653,100,000
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (RSUD KH Daud Arif)				1 Paket	90,000,000	1 Paket	248,050,000	1 Paket	126,750,000	1 Paket	126,750,000	1 Paket	126,750,000	1 Paket	718,300,000
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (RS Suryah Khairudin)				1 Paket	146,152,946	1 Paket	85,000,000	1 Paket	85,000,000	1 Paket	85,000,000	1 Paket	85,000,000	1 Paket	486,152,946
		1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	12 Bulan	12 Bulan	222,149,948	1 Paket	510,000,000	1 Paket	61,000,000	1 Paket	67,100,000	1 Paket	67,100,000	1 Paket	67,100,000	1 Paket	994,449,948
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (RSUD KH Daud Arif)			296,199,931		270,000,000		617,100,000		617,100,000		617,100,000		617,100,000		3,034,599,931
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (RS Suryah Khairudin)			222,149,948	2 Paket	306,678,000	2 Paket	366,400,000	2 Paket	421,360,000	2 Paket	421,360,000	2 Paket	421,360,000	2 Paket	2,159,307,948
		1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	12 Bulan	12 Bulan	226,237,970	18 Paket	275,000,000	18 Paket	90,750,000	18 Paket	99,825,000	18 Paket	90,750,000	18 Paket	302,500,000	18 Paket	1,085,062,970

							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (RSUD KH Daud Arif)					110,000,000		332,750,000		332,750,000		121,000,000		121,000,000		1,017,500,000	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (RS Suryah Khairudin)		3 Paket		110,739,984	3 Paket	106,989,984	3 Paket	123,038,482	3 Paket	90,750,000	3 Paket	90,750,000	3 Paket	522,268,450		
		1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dinas Kesehatan)	12 Bulan	12 Bulan	24,000,000	2 Paket	36,000,000	2 Dokumen	11,880,000	2 Dokumen	13,068,000	2 Paket	13,068,000	2 Paket	13,068,000	2 Paket	111,084,000
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(RSUD KH Daud Arif)					14,400,000				43,560,000		43,650,000		43,650,000		188,910,000	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (RS Suryah Khairudin)					10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		54,000,000	
		1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kesehatan)	12 Bulan	12 Bulan	738,468,000	200 Laporan	1,150,000,000	200 Laporan	632,500,000	200 Laporan	695,750,000	200 Laporan	695,750,000	200 Laporan	695,750,000	1000 Laporan	4,608,218,000
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RSUD KH Daud Arif)					179,659,500				302,500,000		302,500,000		302,500,000		1,389,659,500	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RS Suryah Khairudin)					421,042,900				336,939,000		387,480,474		387,480,474		1,920,423,322	
		1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah Perangkat Daerah (Dinkes Kesehatan)	60%	65%		100%	7,397,602,167	100%	5,617,500,000	100%	5,112,010,637	100%	5,157,010,637	100%	5,157,010,637	100%	28,441,134,078
		1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dinas Kesehatan)				5 Unit	100,000,000	3 Unit	125,000,000	3 Unit	55,000,000	5 Unit	100,000,000	5 Unit	100,000,000	25 Unit	480,000,000
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (RSUD KH Daud Arif)					5 Unit	125,000,000	5 Unit	990,000,000	5 Unit	125,000,000	5 Unit	125,000,000	5 Unit	125,000,000	25 Unit	1,490,000,000
		1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dinas Kesehatan)				1 Unit	700,000,000	3 Unit	950,000,000	3 Unit	1,250,000,000	1 Unit	1,250,000,000	1 Unit	1,250,000,000	1 Unit	5,400,000,000
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (RSUD KH Daud Arif)									990,000,000		990,000,000		990,000,000		990,000,000	3,960,000,000

										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (RSUD KH Daud Arif)				12 Laporan	899,932,000	12 Laporan	1,138,500,000	12 Laporan	1,138,500,000	12 Laporan	1,138,500,000	12 Laporan	1,138,500,000	12 Laporan	1,138,500,000	12 Laporan	5,453,932,000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (RS Suryah Khairudin)				1 Laporan	241,774,986	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	941,774,986
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	100%	1,121,749,878	100%	3,609,209,900	100%	3,368,800,000	100%	3,746,840,000	100%	3,730,890,000	100%	3,730,890,000	100%	3,730,890,000	100%	19,308,379,778		
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dinas Kesehatan)	4 Unit	4 Unit	82,855,000	2 Unit	95,000,000	2 Unit	64,500,000	2 Unit	70,950,000	4 Unit	55,000,000	4 Unit	55,000,000	4 Unit	55,000,000	4 Unit	423,305,000	
										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (RSUD Daud Arif)					27,500,000		24,200,000		27,500,000		27,500,000		27,500,000		27,500,000		134,200,000		
										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (RS Suryah Khairudin)					206,005,200		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		286,005,200		
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dinas Kesehatan)	36 Unit	36 Unit	548,925,678	30 Unit	850,000,000	30 Unit	486,000,000	30 Unit	533,500,000	30 Unit	533,500,000	30 Unit	533,500,000	30 Unit	533,500,000	30 Unit	3,485,425,678	
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (RSUD KH Daud Arif)					292,052,000		302,500,000		302,500,000		302,500,000		302,500,000		302,500,000		1,502,052,000		
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (RS Suryah Khairudin)					16 Unit	206,005,200	16 Unit	200,000,000	16 Unit	200,000,000	16 Unit	200,000,000	16 Unit	200,000,000	16 Unit	200,000,000	16 Unit	1,006,005,200	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dinas Kesehatan)	20 Unit jenset, 300 AC, 80 Unit Komputer, 1 unit Sumur Bor	20 Unit jenset, 300 AC, 80 Unit Komputer, 1 unit Sumur Bor	143,072,200	127 unit	185,000,000	127 unit	105,500,000	127 unit	116,050,000	19 Unit	116,050,000	19 Unit	116,050,000	19 Unit	116,050,000	19 Unit	781,722,200	
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (RSUD KH Daud Arif)					520,510,000		302,500,000		498,200,000		498,200,000		498,200,000		498,200,000		2,317,610,000		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (RS Suryah Khairudin)					345 Unit	250,977,500	345 Unit	213,600,000	345 Unit	245,640,000	345 Unit	245,640,000	345 Unit	245,640,000	345 Unit	245,640,000	345 Unit	1,201,497,500	

							Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (RSUD KH Daud Arif)				2 Paket	5,784,943,000	2 Paket	7,150,000,000	2 Paket	7,150,000,000	2 Paket	7,150,000,000	2 Paket	7,150,000,000	2 Paket	34,384,943,000	
							Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (RS Suryah Khairudin)				1 Paket	1,283,339,270	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,150,000,000	1 Paket	1,150,000,000	1 Paket	1,150,000,000	1 Paket	5,733,339,270	
		1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Dinas Kesehatan)			1 Paket	2,000,000,000	1 Paket	900,000,000	1 Paket	1,650,000,000	1 Paket	2,855,495,947	1 Paket	2,855,495,947	1 Paket	10,260,991,894	
							Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (RSUD KH Daud Arif)				1 Paket	4,763,465,500	1 Paket	9,097,000,000	1 Paket	9,097,000,000	1 Paket	9,097,000,000	1 Paket	9,097,000,000	1 Paket	41,151,465,500	
							Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (RS Suryah Khairudin)				2 Paket	1,598,862,204	2 Paket	1,020,000,000	2 Paket	1,173,000,000	2 Paket	1,173,000,000	2 Paket	1,173,000,000	2 Paket	6,137,862,204	
		1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan (Dinas Kesehatan)	1 Pustu	9 Pustu	459,324,000	9 Pustu	3,500,000,000	9 unit	1,602,103,000	9 unit	1,762,313,410	9 Pustu	2,852,543,203	9 Pustu	2,852,543,203	9 Pustu	13,028,826,816
							Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan (RSUD Daud Arif)				1RSUD	11,580,535,000	1RSUD	11,580,535,000	1RSUD	11,580,535,000	1RSUD	11,580,535,000	1RSUD	11,580,535,000	1RSUD	57,902,675,000	
		1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	16 Pusk dan 2 RS	16 Pusk dan 2 RS	186,900,000	160 Unit	400,000,000	160 Unit	300,000,000	160 Unit	330,000,000	160 Unit	462,000,000	160 Unit	462,000,000	160 Unit	2,140,900,000
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RSUD KH Daud Arif)				186,900,000		440,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000		462,000,000		462,000,000		3,750,900,000
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (RS Suryah Khairudin)				160,200,000	85 Unit	140,000,000	85 Unit	150,000,000	85 Unit	172,500,000	85 Unit	396,000,000	85 Unit	396,000,000	85 Unit	1,414,700,000
		1	02	02	2.01	21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksinasi, bahan medis habis pakai (BMHP) makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman Yang didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lain nya (Dinas Kesehatan)				16 paket		83,114,194	16 paket		91,425,613	17 UPTD	91,425,613	17 UPTD	91,425,613	17 UPTD	357,391,033
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan esensial sesuai standar (Puskesmas/Rumah Sakit)	16 Puskesmas, 2 RSUD, 1 IFK	16 Puskesmas, 2 RSUD, 1 IFK	39,864,993,944	16 Puskesmas, 2 RSUD, 1 IFK	19,778,496,464	16 Puskesmas, 2 RSUD, 1 IFK	42,437,541,800	16 Puskesmas, 2 RSUD, 1 IFK	64,286,936,980	16 Puskesmas, 2 RSUD, 1 IFK	33,446,173,700	16 Puskesmas, 2 RSUD, 1 IFK	33,579,833,950	16 Puskesmas, 2 RSUD, 1 IFK	233,393,976,838
		1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)				6.290 Orang	81,070,000	6.290 Orang	1,891,770,000	6.290 Orang	2,080,947,000	6.290 Orang	118,678,000	6.290 Orang	118,678,000	6.290 Orang	4,291,143,000

		1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)			200 Orang	56,000,000	200 Orang	61,600,000	200 Orang	67,760,000	200 Orang	65,000,000	200 Orang	65,000,000	200 Orang	315,360,000		
		1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dinas Kesehatan)	2000 Kantong Darah	2000 Kantong Darah	140,000,000	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	570,000,000	4 Dokumen	627,000,000	4 Dokumen	220,000,000	4 Dokumen	220,000,000	4 Dokumen	1,837,000,000	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (RSUD KH Daud Arif)			15 Event	90,000,000	15 Event	220,000,000	15 Event	220,000,000	15 Event	120,000,000	15 Event	120,000,000	15 Event	770,000,000		
		1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dinas Kesehatan)			1 Dokumen	86,000,000	1 Dokumen	94,600,000	1 Dokumen	104,060,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	524,660,000		
	Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	100%	100%	2,568,170,395	7 Dokumen	450,000,000	7 Dokumen	2,653,400,228	7 Dokumen	2,918,740,251	7 Dokumen	365,185,000	7 Dokumen	365,185,000	7 Dokumen	6,752,510,479	
		1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	90%	92%	6,467,239,600	1 Dokumen	6,482,200,000	1 Dokumen	10,000,000,000	1 Dokumen	19,785,232,000	1 Dokumen	7,000,000,000	1 Dokumen	7,000,000,000	1 Dokumen	50,267,432,000	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD KH Daud Arif)			1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	8,250,000,000		
		1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Dinas Kesehatan)			200 Orang	85,219,000	200 Orang	93,741,072	200 Orang	103,115,179	200 Orang	98,250,000	200 Orang	98,250,000	200 Orang	478,575,251		
		1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Dinas Kesehatan)			230 Paket	73,000,000	230 Paket	80,300,000	230 Paket	88,330,000	230 Paket	85,000,000	230 Paket	85,000,000	230 Paket	411,630,000		
		1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dinas Kesehatan)			100%	73,000,000	100%	90,000,000	100%	99,000,000	100%	96,000,000	100%	96,000,000	100%	96,000,000	100%	454,000,000
		1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)			5 Unit	250,000,000	5 Unit	500,000,000	5 Unit	550,000,000	5 Unit	550,000,000	5 Unit	550,000,000	5 Unit	2,400,000,000		
		1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD KH Daud Arif)			2 Dokumen	385,000,000	2 Dokumen	3,850,000,000	2 Dokumen	3,850,000,000	2 Dokumen	493,500,000	2 Dokumen	563,500,000	2 Dokumen	9,142,000,000		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RS Suryah Khairudin)			2 Dokumen	165,000,000	2 Dokumen	991,647,536	2 Dokumen	1,140,394,666	2 Dokumen	211,500,000	2 Dokumen	241,500,000	2 Dokumen	2,750,042,202		

		1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan (Dinas Kesehatan)	16 Puskesmas	16 Puskesmas	138,699,800	16 Dokumen	250,000,000	16 Dokumen	4,125,600,000	16 Dokumen	14,438,160,000	16 Dokumen	14,125,600,000	16 Dokumen	14,125,600,000	16 Dokumen	47,203,659,800	
		1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya (Dinas Kesehatan)	3 Kec	13 Kec	138,699,800	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	330,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	1,718,699,800	
		1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	0%	100%	250,000,000	12 Unit	350,000,000	12 Unit	350,000,000	12 Unit	385,000,000	12 Unit	250,000,000	12 Unit	250,000,000	12 Unit	1,835,000,000	
								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (RSUD KH Daud Arif)	0%		491,178,759	12,5%	75,000,000	12,5%	385,000,000	12,5%	385,000,000	12,5%	150,000,000	12,5%	150,000,000	12,5%	1,636,178,759	
								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (RS Suryah Khairudin)			491,178,759	1 RS	630,452,464	1 RS	544,852,464	1 RS	626,580,334	1 RS	445,000,000	1 RS	445,000,000	1 RS	3,183,064,021	
		1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal(Dinas kesehatan)	100%		25,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	385,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	1,235,000,000	
		1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah Dinas Kesehatan)	100%	100%		1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	27,500,000	1 Dokumen	30,250,000	1 Dokumen	38,500,000	1 Dokumen	38,500,000	1 Dokumen	309,750,000	
		1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Publik Safety Center (PSC 119) tersediaan ,terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan Gawat darurat terpadu (SPGDT) (Dinas Kesehatan)				1 Unit	175,000,000	1 Unit	140,074,000	1 Unit	154,081,400	1 Unit	227,868,000	1 Unit	227,868,000	1 Unit	749,891,400	
		1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatan nya oleh tenaga kesehatan puskesmas (Dinas Kesehatan)				63898 Keluarga		300,000,000	63898 Keluarga	350,000,000	63898 Keluarga	350,000,000	63898 Keluarga	350,000,000	63898 Keluarga	350,000,000	63898 Keluarga	2,557,180,000
		1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan aplikasi pemerintah daerah	0		388,854,900		1,207,180,000	1	743,480,000	1	1,397,728,000	1	1,332,180,000	1	1,357,180,000	1	6,426,602,900	
		1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	2 Dokumen	2 Dokumen	87,000,000	10 Dokumen	175,000,000	10 Dokumen	175,000,000	10 Dokumen	192,500,000	10 Dokumen	175,000,000	10 Dokumen	175,000,000	10 Dokumen	979,500,000	
		1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	5 Aplikasi	5 Aplikasi	301,854,900	2 Dokumen	105,480,000	2 Dokumen	205,480,000	2 Dokumen	226,028,000	2 Dokumen	205,480,000	2 Dokumen	205,480,000	2 Dokumen	1,249,802,900	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (RSUD Daud Arif)				2 Dokumen	676,700,000	2 Dokumen	88,000,000	2 Dokumen	676,700,000	2 Dokumen	676,700,000	2 Dokumen	676,700,000	2 Dokumen	2,794,800,000	

		1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan(Dinas kesehatan)			1 Unit	250,000,000	1 Unit	275,000,000	1 Unit	302,500,000	1 Unit	275,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	1,402,500,000	
		1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas		18 Dokumen		139,335,320		235,000,000		934,000,000		743,050,000		324,000,000		324,000,000	2,699,385,320
		1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		2 Unit		2 Unit	60,500,000	2 Unit	66,550,000	2 Unit	60,500,000	2 Unit	60,500,000	2 Unit	60,500,000	2 Unit	248,050,000
		1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)		2 Unit		2 Unit	85,000,000	2 Unit	213,500,000	2 Unit	234,850,000	2 Unit	93,500,000	2 Unit	93,500,000	2 Unit	720,350,000
		1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan)	16 Puskesmas	16 Puskesmas	74,335,320	16 Unit	75,000,000	16 Unit	330,000,000	16 Unit	363,000,000	16 Unit	95,000,000	16 Unit	95,000,000	16 Unit	1,032,335,320
		1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dinas Kesehatan)	16 Puskesmas	16 Puskesmas	65,000,000	2 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	330,000,000	2 Dokumen	78,650,000	2 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	698,650,000
		1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan				17,814,205,000		15,045,655,000		960,875,500		1,056,963,050		553,520,000		553,520,000	2,952,119,000
		1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP (Dinas Kesehatan) Presentase Praktik Tenaga Kesehatan yang Di awasi dan di bina (Dinas Kesehatan)	511 Orang	300 orang	175,200,000	300 orang	75,000,000	300 orang	441,655,500	300 orang	485,821,050	300 orang	82,720,000	300 orang	82,720,000	1500 orang	589,352,000
		1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	511 Orang	300 orang	175,200,000	2 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	82,720,000	2 Dokumen	90,992,000	2 Dokumen	82,720,000	2 Dokumen	82,720,000	2 Dokumen	589,352,000

						pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tidak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan (dinas kesehatan)				12 Dokumen	358,935,500	12 Dokumen	394,829,050	12 Dokumen	394,829,050	12 Dokumen	394,829,050	12 Dokumen	1,543,422,650				
																					-			
						Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Presentase fasyankes yang memiliki dokumentasi SDMK (Dinkes Kesehatan)														-			
										100%		-	54.5%	14,814,850,000		343,000,000	-	377,300,000	-	377,300,000	-	377,300,000	-	1,564,900,000
						Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas kesehatan)				2 Dokumen	90,000,000	2 Dokumen	193,000,000	2 Dokumen	212,300,000	2 Dokumen	212,300,000	2 Dokumen	212,300,000	2 Dokumen	212,300,000	2 Dokumen	919,900,000
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD KH Daud Arif)					150,000,000				165,000,000				165,000,000		165,000,000		645,000,000
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Dinas Kesehatan)				588 Orang	8,500,000,000	588 Orang	9,000,000,000	588 Orang	9,900,000,000	588 Orang	9,900,000,000	588 Orang	9,900,000,000	588 Orang	9,900,000,000	588 Orang	41,766,425,000
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (RSUD KH Daud Arif)					3,066,425,000		155,805,000		165,000,000		165,000,000		165,000,000		165,000,000		3,717,230,000
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (RS Suryah Khairudin)				227 Orang	3,066,425,000	227 Orang	2,760,000,000	227 Orang	3,174,000,000	227 Orang	3,174,000,000	227 Orang	3,174,000,000	227 Orang	3,174,000,000	227 Orang	15,348,425,000

		01	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumentasi hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan (Dinas Kesehatan)				12 Dokumentasi	92,000,000	12 Dokumentasi	176,750,000	12 Dokumentasi	194,425,000	12 Dokumentasi	194,425,000	12 Dokumentasi	194,425,000	12 Dokumentasi	852,025,000		
								Jumlah dokumentasi hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan (RSUD KH Daud Arif)					92,500,000				101,750,000		101,750,000		101,750,000		397,750,000		
		1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan SIP (Dinas Kesehatan)	511 Orang				85,000,000	155,805,000	176,220,000		193,842,000		93,500,000		93,500,000		797,867,000		
		1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Dinas Kesehatan)	511 Orang	300 orang			85,000,000	195 orang	155,805,000	195 orang	176,220,000	195 orang	193,842,000	195 orang	93,500,000	195 orang	93,500,000	195 orang	797,867,000
		1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						474,090,000	461,000,000	522,684,225		548,818,436		576,259,358		605,072,326		3,224,718,845		
		1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional yang memiliki izin (Persen)	100%	100%			130,000,000	100%	176,000,000	100%	135,000,000	100%	574,952,648	100%	173,397,000	100%	173,397,000	100%	936,294,000
		1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20%	10%			40,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	44,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	259,000,000
		1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	35 Orang	35 Orang			50,000,000	36 Sarana	50,000,000	36 Sarana	55,000,000	36 Sarana	60,500,000	36 Sarana	55,000,000	36 Sarana	55,000,000	36 Sarana	325,500,000
		1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	40%	10%			40,000,000	30 Sarana	71,000,000	30 Sarana	40,000,000	30 Sarana	44,000,000	30 Sarana	78,397,000	30 Sarana	78,397,000	30 Sarana	351,794,000

		1	02	04	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sampel PKRT yang dilakukan pemeriksaan	90 Sampel	90 Sampel	83,000,000	100 Sampel	56,000,000	110 Sampel	99,450,000	115 Sampel	109,395,000	120 Sampel	99,450,000	130 Sampel	99,450,000	130 Sampel	546,745,000	
		1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	50 Sampel	50 Sampel	43,000,000	1 Dokumen	56,000,000	1 Dokumen	43,000,000	1 Dokumen	47,300,000	1 Dokumen	43,000,000	1 Dokumen	43,000,000	1 Dokumen	275,300,000
		1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	40 Sampel PKRT	40 Sampel PKRT	40,000,000		1 Dokumen	56,450,000	1 Dokumen	62,095,000	1 Dokumen	56,450,000	1 Dokumen	56,450,000	1 Dokumen	271,445,000	
		1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP mengikuti pengawasan pembinaan pre market produk rumah tangga.	80	80	55,320,000	40%	68,000,000	80	55,320,000	90	60,852,000	90	55,320,000	90	55,320,000	90	350,132,000
		1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80	80	55,320,000	1 Dokumen	68,000,000	1 Dokumen	55,320,000	1 Dokumen	60,852,000	1 Dokumen	55,320,000	1 Dokumen	55,320,000	1 Dokumen	350,132,000
		1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pengawasan Kualitas Air Minum Sesuai Standar	50%	6,3%	58,000,000	-	12,5%	158,000,000	12,5%	63,800,000	6,3%	45,000,000	6,3%	45,000,000	100%	211,800,000	

		1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50%	6,3%	58,000,000			1 Dokumen	58,000,000	1 Dokumen	63,800,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	211,800,000		
		1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makananan jajanan	Jumlah Pengelola Program PJAS yang mengikuti Pembinaan keamanan Pangan di sekolah (Dinas Kesehatan)						40 Orang	50,000,000	40 Orang	55,000,000	40 Orang	55,000,000	40 Orang	55,000,000	40 Orang	215,000,000		
		1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	215,000,000	
		1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP terawasi dan terbina pada postmarket pemberian sertifikat produksi IRTP (Dinas Kesehatan)	90 IRTP		97,770,000	161,000,000			124,914,000		137,405,648		153,092,358		181,905,326		856,087,332		
		1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	20%	10%	57,070,000	70 Sarana	95,300,000	70 Sarana	84,214,000	70 Sarana	92,635,648	70 Sarana	112,392,358	70 Sarana	141,205,326	70 Sarana	582,817,332		
		1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Dinas Kesehatan)	20%	10%	40,700,000	1 Dokumen	65,700,000	1 Dokumen	40,700,000	1 Dokumen	44,770,000	1 Dokumen	40,700,000	1 Dokumen	40,700,000	1 Dokumen	40,700,000	1 Dokumen	273,270,000
		1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				150,000,000	341,000,000			165,000,000		180,000,000		195,000,000		210,000,000		1,241,000,000		
								Persentase Desa/ Kelurahan ODF (Open Defecation Free)	16,4%	20,8%	150,000,000	32,83%	341,000,000	56,71%	165,000,000	80%	180,000,000	93%	195,000,000	100%	210,000,000	100%	1,241,000,000		
		1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan yang dibuat oleh Dinkes maupun pemerintah daerah	2	2	20,000,000	2	200,000,000	2	30,000,000	2	33,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	12	323,000,000		
		1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	2 Kec	2 Kec	20,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	33,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	323,000,000		

		1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase desa/ kelurahan siaga (Persen)	15%	20%	65,000,000	20%	65,500,000	25%	190,000,000	25%	209,000,000	25%	110,000,000	25%	125,000,000	25%	764,500,000
		1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	40 %	43%	65,000,000	1 dokumen	65,500,000	1 dokumen	190,000,000	1 dokumen	209,000,000	1 dokumen	110,000,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	764,500,000
		1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM (Posyandu aktif)	158 Posyandu	20 Posyandu	25,000,000	2.2%	75,500,000	20 Posyandu	45,000,000	20 Posyandu	49,500,000	20 Posyandu	35,000,000	20 Posyandu	35,000,000	298 Posyandu	265,000,000
		1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	158 Posyandu	20 Posyandu	25,000,000	1 Dokumen	75,500,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	49,500,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	265,000,000
											226,993,302,838		381,563,979,341		209,203,152,024		221,385,764,407		219,273,064,927		224,631,862,322	1,690,288,372,889	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat pening untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator program dan kegiatan.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indicator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indicator kinerja Program pembangunan daerah sebagai indicator kinerja utama.

Adapun Indikator Kinerja Dinas kesehatan dalam mendukung RPJMD 2021-2026 sebagaimana Tabel dibawah ini.

TABEL T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pengawasan Kualitas Air Minum Sesuai Standar	8 Puskesmas	1 Puskesmas	2 Puskesmas	2 Puskesmas	2 Puskesmas	1 Puskesmas	16 Puskesmas
2	Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) Yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Aturan	10 Puskesmas 2 RS	1 Puskesmas	2 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	16 Puskesmas 2 RS

3	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	84,7%	44%	50%	56%	62%	65%	65%
4	Persentase Tempat dan Fasilitas Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	69%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
5	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	56,3%	6,3%	12,5%	12,3%	6,3%	6,3%	100%
6	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga	56,3%	6,3%	12,5%	12,3%	6,3%	6,3%	100%
7	Persentase Kunjungan ibu hamil (K4)	78%	80%	90%	90%	93%	95%	97%

8	Persentase Persalinan di tolong tenaga kesehatan di Fasilitas kesehatan (PF)	82%	85%	91%	91%	92%	94%	96%
9	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	80%	85%	90%	90%	92%	94%	96%
10	Persentase Cakupan Pelayanan Anak Balita	70%	72%	75%	75%	78%	79%	80%
11	Persentase Puskesmas Menyeleenggarakan Pelayanan Santun Usila	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%

12	Persentase Puskesmas Menyeleenggarakan Kegiatan kesehatan Remaja (PKPR)	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
13	Persentase Puskesmas Membina Model Sekolah / Madrasah Sehat	0%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
14	Persentase Ibu Hamil Anemia	6.70%	11,5%	11%	10.5%	10%	10%	10%
15	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	9.80%	11,5%	11%	10.5%	10%	10%	10%
16	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (berat badan < 2500 gram)	2.6%	4%	3.8%	3.6%	3.4%	3.2%	3%

17	Cakupan Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	66.4%	59%	61%	63%	65%	66%	67%
18	Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A	87.7%	91%	92%	93%	95%	95%	95%
19	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (TB/U)	21,8%	18 %	17 %	16 %	15 %	14 %	14 %
20	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita (BB/TB)	2.7%	7%	6,8%	6,5%	6%	5.5%	5%
21	Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan Surveilans Gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

22	Persentase Puskesmas mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan GERMAS.	2 Kec	2 Kec	2 Kec	1 Kec	1 Kec	1 Kec	10 Kec
24	Persentase kec. yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	52,3%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
25	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Daerah terpencil	17.85%	12.5%	25%	37%	50%	62.5%	100%
26	Tersedianya Sarana dan Prasana di Fasilitas Kesehatan sesuai standar	5 Pusk	2 Pusk	2 Pusk	2 Pusk	2 Pusk	1 Pusk	16 Pusk

27	Tersedianya Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan sesuai standar	1 Pusk	3 pusk	3 pusk	3 pusk	2 Pusk	2 Pusk	16 Pusk
28	Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan	71,13 %	77%	79%	80%	82%	85%	85%
29	Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang memiliki Jaminan Kesehatan	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%
30	Jumlah Rumah Singgah bagi keluarga Pasien RS yg tersedia	1 Rumah	1 Rumah	1 Rumah	1 Rumah	1 Rumah	1 Rumah	1 Rumah
31	Sucsess rate TBC	99,3 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Presentase Kasus HIV/AIDS yang di obati sesuai standar	54%	60%	60%	61%	62%	64%	64%

33	Annualy parasite Insidence (API) < 1/mil	< 1/1000 pddk	< 1/1000 pddk	< 1/1000 pddk	< 1/1000 pddk	< 1/1000 pddk	< 1/1000 pddk	< 1/1000 pddk
34	Angka Kejadian Kasus (incidence Rate/IR) DBD	73,3 per 100.000 pddk	<49	<49	<49	<49	<49	<49
35	Pelayanan penanganan KLB kurang dari 24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Jumlah pengelolaan pelayanan krisis kesehatan yang direspon kurang dari 24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Persentase Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap pada Balita	92.5%	93%	93.5%	94%	94.5%	95%	95%
38	Persentase Cakupan Desa Uci	86.60%	93 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

39	Presentase Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Jumlah Invenstigasi KIPI yang di Respon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Ketepatan Kelengkapan Laporan dan Verivikasi Alert	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	Presentase Penurunan Penemuan Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
43	Penemuan kasus Non Polio AFP rate	$\geq 2/ 100.000$ penduduk	$\geq 2/ 100.000$ penduduk	$\geq 2/ 100.000$ penduduk	$\geq 2/ 100.000$ penduduk	$\geq 2/ 100.000$ penduduk	$\geq 2/ 100.000$ penduduk	$\geq 2/ 100.000$ penduduk

44	Penemuan Kasus IR (Insidens Rate) Campak Klinis	> 10/ 100.000 penduduk	> 10/ 100.000 penduduk	> 10/ 100.000 penduduk	> 10/ 100.000 penduduk	> 10/ 100.000 penduduk	> 10/ 100.000 penduduk	> 10/ 100.000 penduduk
45	Jumlah CJH (Calon Jemaah Haji) yang diperiksa 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	Penurunan Prevalensi Hipertensi	32.20%	32.2%	31,5 %	31%	30,5%	30%	30%
47	Penurunan Prevalensi Diabetes Melitus (DM)	2.00%	1.60%	1.55%	1.52%	1.50%	1.50%	1.50%
48	Peningkatan Prevalensi ODGJ Berat	4,70/mil	4.75/Mil	4.90/Mil	5.0/Mil	5.2/Mil	5.2/Mil	5.2/Mil

49	Cakupan puskesmas yang memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan (dokter, drg, perawat, bidan, farmasi, kesmas, kesling, gizi dan laboratorium)	50%	75%	81,25%	87,5%	93,75%	100%	100%
50	Cakupan tenaga kesehatan memenuhi standar kompetensi	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%
51	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	20 org	25 org	30 org	35 org	40 org	45 org	45 org
52	Cakupan tenaga kesehatan yang memiliki SIP dan SIK	65%	70%	85%	90%	95%	100%	100%

53	Cakupan tenaga kesehatan yang menyelesaikan DUPAK yang tepat waktu	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
54	Jumlah sampel produk perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang beredar sesuai standar / kebutuhan	90 sampel	100 sampel	120 sampel	130 sampel	130 sampel	130 sampel	130 sampel
55	Jumlah Puskesmas yang alat kesehatannya dikalibrasi	16 pkm	16 pkm	16 pkm	16 pkm	16 pkm	16 pkm	16 pkm
56	Jumlah Puskesmas yang menggunakan obat rasional Sesuai Standar	40%	50%	55%	60%	65%	67%	67%

57	Presentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	50.00%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
58	Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat SPP-PIRT	150 Sarana	80 Sarana	80 Sarana	80 Sarana	80 Sarana	80 Sarana	450 sarana
59	Presentase sekolah yang di latih dan di fasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
60	Jumlah Sarana PSC	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8 Unit
61	Jumlah Tenaga yang mempunyai Kompetensi Kegawatdaruratan	1 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	13 Orang

62	Jumlah Sarana Puskesmas sesuai Propotype	1 Pusk	1 Pusk	2 Pusk	3 Pusk	3 Pusk	3 Pusk	16 Puskesmas
63	Jumlah Sarana Mobilitas Rujukan	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	18 Unit
64	Persentase SPM Rumah Sakit yang Terpenuhi(%)	74,00%	75%	77%	79%	81%	85%	85%
65	Nilai Kepuasan Maaasyarakat Terhadap Pelayanan	77%	82,5%	83%	83,5%	84%	84,5%	84,5%

66	Pencapaian Indikator Sesuai Standart	42,43%	45,00%	49,00%	53,00%	57,00%	60%	60P%
	-BOR	3,06 Hr	3 Hr	3 Hr	3 Hr	3 Hr	3 Hr	3 Hr
	-LOS	4,16 Hr	3 Hr	3 Hr	2 Hr	2 Hr	2 Hr	2 Hr
	-TOI	6,08	3.5	3.4	3.3	3.2	3	3
	-GDR	2,41	2.5	2.5	2.5	2.5	2,5	2,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang Berisi VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, SASARAN berikut indicator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu lima tahun.

Perencanaan Strategis ini merupakan kesepakatan bersama seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Tabung Barat yang merupakan perwujudan niat dan cita-cita luhur dalam menunjang eksistensi Dinas Kesehatan serta tetap melibatkan unsur lintas sektor.

Tentunya rencana strategis ini hanya akan sangat bermanfaat bila semua pelaksana pembangunan kesehatan bekerja penuh dedikasi dan berorientasi pada tujuan akhir pembangunan sebagaimana amanah para pelopor kemerdekaan. Pendiri Republik Indonesia yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945.

Demikianlah Renstra Awal Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 ini, semoga dapat menjadi pedoman pada pelaksanaan Pembangunan Kesehatan pada masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Juli 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. ZAHARUDIN, SKM

Pembina/IV a

NIP. 196704 07199103 1 006